

Harian
JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

PEMBINA :
Letjend TNI (Purn) Dr. SUTIYOSO
Mayjen TNI (Purn) Dr. SAURIP KADI, S.E.,MM., MBA.
Pendiri, Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab :
TONI LIMBONG, SH.

REDAKSI:
Jl Komplek Depag Blok G2 No.83
RT012 RW003 Kelurahan Kedaung,
Kaliangke, Jakarta Barat,
Telp: (021) 23095745
Email: harianjayapos@yahoo.co.id

TERVERIFIKASI DEWAN PERS

SENIN: EDISI 867 TAHUN XX, 23 - 29 NOVEMBER 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

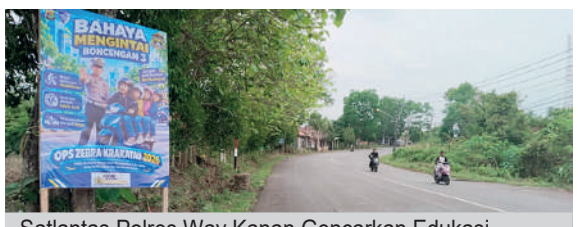
Satlantas Polres Way Kanan Pasang Banner Imbauan, Ajak Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Way Kanan, Jaya Pos

Satlantas Polres Way Kanan memasang banner imbauan keselamatan berlalu lintas di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) 194, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Operasi Zebra Krakatau 2026 yang bertujuan meningkatkan

▸▸ Halaman 5



Satlantas Polres Way Kanan Gencarkan Edukasi Operasi Zebra 2026.(Humas Polri)

Pemkab Deli Serdang Bedah 7 Rumah Warga di Deli Tua Lewat Program Kampung Berkah

Deli Serdang, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang merenovasi tujuh rumah warga di Lingkungan IV dan V, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua. Renovasi tersebut merupakan bagian dari program Kampung Berkah (Bebas Kumuh, Rapi, Kreatif, Asri, dan Harmoni) untuk menata dan mengentaskan kawasan kumuh.

▸▸ Halaman 5


Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyerahkan kunci tujuh rumah yang telah direnovasi kepada keluarga penerima manfaat.(Foto Rd)

RUU Perampasan Aset Disahkan, Prabowo Diminta Bentuk Badan Baru: Perlukah?



Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

> DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Namun, rencana pembentukan badan pengelola dan pengawas aset menuai sorotan karena Kejaksaan Agung telah memiliki Badan Pemulihan Aset (BPA). Apakah perlu membentuk lembaga baru atau cukup memperkuat yang sudah ada?.

Jakarta, Jaya Pos

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI membuka jalan pembentukan badan baru untuk mengelola dan mengawasi aset hasil tindak pidana. Namun, rencana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi lembaga baru, terutama karena sejumlah institusi telah menjalankan fungsi serupa.

Presiden Prabowo Subianto mendapat amanat membentuk Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset setelah DPR mengesahkan RUU tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pembentukan dua badan tersebut menambah daftar institusi baru di era pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan BPI Danantara. Rencana ini juga menjadi soro-

▸▸ Halaman 5

Gubernur Sumatera Barat Bersama Wawako Membukaan MTQ Ke 42 Kota Bukittinggi


Pidato sambutan Staf ahli Gubernur Sumbar Dr. Ir. Reti Wafdah, M.TP


Pidato sambutan Wawako Bukittinggi Ibnu Asis, S.TP


Foto bersama usai menabuh gendang pembukaan MTQ

Bukittinggi, Jaya Pos.

Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an(MTQ) ke 42 tahun 2026 tingkat kota Bukittinggi berlangsung sukses, hikmat, dan meriah di lapangan Wirabraja - KODIM 0304 Agam, Jumat(20/11).

Dalam acara pembukaan MTQ tersebut di hadiri oleh Gubernur Sumatera Barat(Sumbar yang di wakili staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Dr. Ir. Reti Wafda, MTP juga Wakil Walikota(Wawako) Bukittinggi Ibnu Asis, S.TP, dan beserta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah(Forkopimda).

▸▸ Halaman 5

Padang Panjang Raih Penghargaan Nasional Smart City 2026 dari Kementerian Komdigi

Jambi, Jaya Pos

Kota Padang Panjang meraih Penghargaan Kota Cerdas (Smart City) 2026 kategori Inovasi Digital Berdampak pada Smart Economy yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, dalam acara penganugerahan di BW Luxury, Jambi, Kamis (19/11/2026). Penghargaan diterima Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Harry Rizka Perdana. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengembangkan inovasi serta memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wako Hendri Arnis menyam-


Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Harry Rizka Perdana saat menerima penghargaan. (Foto ist

paikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam mengembangkan berbagai inovasi di lingkungan Pemko.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan," katanya.

Ia juga mengapresiasi peran Dinas Kominfo dalam mengkoordinasikan pengembangan teknologi

▸▸ Halaman 5


Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Sonya Themiarto Menerima Penghargaan dariDirektur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti. (Foto: istimewa)

Dua Penghargaan Nasional Kemenkes Diraih Padang Panjang, Bukti Komitmen Tingkatkan Kualitas Kesehatan

Jakarta, Jaya Pos

Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kali ini, Kota Padang Panjang berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia atas capaian membanggakan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Dua penghargaan tersebut masing-masing diberikan dalam kategori Kabupaten/Kota dengan Cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah Tertinggi Regional Barat dan Kabupaten/Kota Tidak Ada Kematian Ibu. Prestasi ini menjadi bukti keseriusan Pemko Padang Panjang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Penghargaan diterima langsung Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Sonya Themiarto. Penyerahan dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti, dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 melalui kegiatan Health Innovation Festival (HAI FEST), Selasa (17/11/2026), di Balai Kartini, Jakarta.

Dua penghargaan tersebut bu-

▸▸ Halaman 5

Rapat Paripurna, Pemkab Sukabumi Bersama DPRD Sepakati 3 Raperda



Bupati Sukabumi H.Asep Japar Bersana Ketua DPRD H. Budi Azwar Mutawali dan Wakil Ketua DPRD. (Foto: Ist)

Sukabumi, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin, 16 November 2026.

Ketiga Raperda tersebut meliputi APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bupati Sukabumi H Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan ketiga regulasi tersebut.

Menurutnya, Raperda tentang Desa menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan desa, mulai dari kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.

"Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel," ungkapnya.

Sementara itu, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 mengatur peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun persetujuan APBD 2027 telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat dan penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bupati berharap, kesepakatan ketiga Raperda tersebut tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk kesepakatan atas ketiga Raperda tersebut.**(YUD)**

Galuh Travel Mart BP2D Jadi Strategi Ciamis Tarik Wisatawan



Kepala BP2D Ciamis, Endang Haris Juandana. (Foto:ist)

Ciamis, Jaya Pos

Berbagai upaya gencar dilakukan Pemkab Ciamis dengan memperluas jangkauan pemasaran pariwisata dengan mendatangi langsung pasar potensial di luar daerah.

Pemkab Ciamis berupaya membuka jalur promosi sekaligus membangun jejaring bisnis dengan pelaku industri pariwisata, melalui kegiatan Galuh Travel Mart di Ballroom Convention Hall, Sabda Alam Resort & Hotel, Kabupaten Garut, Kamis (19/11) Mengusung tema "Discover Galuh Connect the Journey Joy of Ciamis", kegiatan yang digagas Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D) Kabupaten Ciamis ini bukan sekadar ajang memperkenalkan destinasi.

Lebih dari itu, Galuh Travel Mart diarahkan menjadi langkah konkret untuk mempertemukan potensi wisata Ciamis dengan pasar, biro perjalanan, pelaku usaha perhotelan, hingga calon investor.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BP2D Kabupaten Ciamis, Endang Haris Juandana sewaktu disambangi japos.co diruangannya, Kamis (19/11). Menurutnya, pemilihan Garut sebagai lokasi kegiatan memiliki pertimbangan tersendiri.

Dikatakannya, selama ini arus perjalanan wisata dari sejumlah daerah, seperti Bandung dan Jakarta, kerap menjadikan Garut sebagai salah satu tujuan. Peluang untuk mengarahkan wisatawan agar melanjutkan perjalanan ke Ciamis masih belum tergarap secara optimal.

Ditegaskannya, promosi pariwisata tidak cukup hanya dilakukan dengan menunggu wisatawan datang. Daerah harus aktif membangun komunikasi dan menjalin kerja sama dengan pelaku industri perjalanan agar destinasi Ciamis masuk dalam pilihan tujuan wisata. "Terlebih, Garut dan Ciamis memiliki sejumlah kemiripan karakter geografis, terutama dari sisi wisata pegunungan, alam, sungai, serta potensi wisata religi. Kesamaan tersebut menjadi peluang untuk menjangkau segmen wisatawan yang relatif sama, " tegas Endang sembari berharap melalui Galuh Travel Mart, biro perjalanan wisata di Garut dapat melihat peluang tersebut dan mulai memasukkan destinasi Ciamis ke dalam paket perjalanan yang mereka tawarkan.

Dijelaskannya, Galuh Travel Mart juga menjadi ruang promosi bagi produk unggulan dan potensi ekonomi kreatif Kabupaten Ciamis. Materi yang diperkenalkan tidak hanya berfokus pada destinasi wisata, tetapi mencakup produk lokal, atraksi budaya, kuliner, hingga kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Batik Cakra Galuh. Batik khas Ciamis tersebut akan diperkenalkan melalui peragaan busana (fashion show) serta demonstrasi membatik tulis secara langsung.

Melalui atraksi tersebut, peserta tidak hanya melihat hasil produk, tetapi juga dapat mengenal proses pembuatan batik dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Selain batik, Ciamis turut membawa kerajinan berbahan pandan, seperti tas dan berbagai produk kreatif lainnya.

Produk tersebut menjadi representasi potensi kerajinan lokal yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi pariwisata. Sementara itu, produk kopi lokal, termasuk Kopi Pajabat, juga diperkenalkan sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. "Kehadirannya diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas, sekaligus memperkenalkan kekhasan produk kopi Ciamis kepada pelaku industri pariwisata dan calon konsumen, " jelas Endang.

Tidak berhenti pada produk ekonomi kreatif, BP2D juga memperkenalkan empat destinasi unggulan yang memiliki karakter dan daya tarik berbeda. Keempatnya yakni Desa Wisata Jalatrang, Desa Wisata Selamanik, Desa Wisata Gunungsari, serta Bukit Sampalan Asri. Destinasi tersebut mewakili keberagaman potensi wisata Ciamis, mulai dari wisata edukasi, budaya, kehidupan masyarakat desa, hingga kawasan alam yang memiliki peluang pengembangan lebih lanjut.

Melalui pengenalan empat destinasi tersebut, BP2D ingin memberikan pilihan yang lebih beragam kepada biro perjalanan wisata di Garut untuk menyusun paket perjalanan menuju Ciamis. Dengan begitu, promosi tidak berhenti pada pengenalan nama destinasi, tetapi diharapkan berlanjut menjadi kunjungan wisatawan yang memberikan dampak terhadap masyarakat dan pelaku usaha setempat

(Mamay)

Pemkot Tangsel Revitalisasi Gedung SDN Parakan,Dibangun 3 Lantai dengan 24 Ruang Kelas



Tangerang Selatan, Jaya Pos

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Pemkot Tangsel tengah melakukan revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Parakan.

Revitalisasi SDN Parakan Kota Tangerang Selatan ini direvitalisasi dengan sempurna dan baik. Lokasi SDN Parakan itu berada di Jl. TPU Parakan, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Terdiri Dari 3 Lantai

Menurut Kepala Bidang Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Tangsel, Maryoto, revitalisasi SDN Parakan saat ini tengah berlangsung. Gedung yang direvitalisasi terdiri dari tiga lantai, kata Maryoto.

"Pembangunan gedungnya itu terdiri dari 3 lantai dan 24 ruang kelas. Lalu, ada ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, 24 toilet siswa, 4 toilet guru," ucap Maryoto, Kamis, 05 November 2026.

Lingkup Pekerjaan

Adapun mengenai lingkup pekerjaa, Maryoto menjelaskan secara rinci. "Mengenai lingkup pekerjaan, kami paparkan yaitu sebagai berikut. Tahapan pekerjaan meliputi pertama, pekerjaan persiapan," sebutnya.

Kemudian, ujar Maryoto, kedua, pekerjaan lantai 1. "Yakni berupa pekerjaan tanah dan pondasi, struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal," cetusnya.

"Ketiga, pekerjaan lantai 2 (struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal). Terus, pekerjaan lantai 3 (struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal)," tandasnya.

Selanjutnya, Maryoto menerangkan, adalah pekerjaan eksterior dan lain-lain. "Ini nanti bagian akhir, ya, eksterior pekerjaan lain-lain," tegasnya.

Gunakan APBD

Pembangunan (revitalisasi) SDN Parakan ini menggunakan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD). "Ya, betul anggarannya bersumber dari APBD Tangsel 2026," pungkasnya. **(ADV)**

DPRD Mojokerto Gelar Paripurna Bahas Raperda APBD 2027 dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Bupati saat Rapat Paripurna. (Dok AD)

Mojokerto, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Rapat berlangsung di Graha Whicesa, Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan Raden Ajeng Basoeni Nomor 35, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Khoirul Anam, dari Partai NasDem, serta dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Albarra, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur rumah sakit umum daerah (RSUD), serta camat se-Kabupaten Mojokerto.

Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian jawaban dan tanggapan resmi Bupati Mojokerto terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya disampaikan dalam pembahasan kedua Raperda tersebut.

Sebelum rapat dibuka, Sekretariat DPRD melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Persidangan terlebih dahulu menyampaikan laporan daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD, serta rekapitulasi surat masuk dan keluar.

Berdasarkan laporan kehadiran, jumlah anggota DPRD dan unsur terkait yang hadir telah memenuhi ketentuan kuorum. Dengan demikian, rapat dinyatakan sah untuk dilaksanakan.

Pimpinan sidang kemudian membuka rapat paripurna secara resmi dan terbuka untuk umum dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim", sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2025.

Selanjutnya, pimpinan sidang menyampaikan susunan agenda rapat, mulai dari pembukaan, penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum masing-masing fraksi, hingga penutupan.

Dalam penyampaiannya, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap berbagai masukan, kritik, serta catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Bupati menjelaskan, penyesuaian sejumlah angka pendapatan dan belanja daerah dilakukan untuk mengakomodasi perubahan alokasi transfer anggaran dari pemerintah pusat.

"Penyesuaian angka pendapatan dan belanja dilakukan untuk mengakomodasi penyesuaian alokasi transfer anggaran dari Pemerintah Pusat berdasarkan surat resmi Kementerian Keuangan," terang Bupati.

Selain pembahasan APBD 2027, pemerintah daerah juga memberikan penjelasan terhadap berbagai masukan fraksi terkait Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama mengenai ketentuan masa jabatan kepala desa.

Bupati menegaskan, masa jabatan kepala desa diatur selama delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua periode, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa yang berlaku.

"Durasi masa jabatan Kepala Desa telah diatur selama delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan atau dua periode, selaras dengan ketentuan Undang-Undang Desa terbaru," tegasnya.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan regulasi daerah, khususnya dalam menentukan arah kebijakan anggaran pembangunan Kabupaten Mojokerto pada 2027 serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Pada akhir rapat, pimpinan sidang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta atas sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif. Pembahasan lanjutan kedua Raperda diharapkan berjalan lancar, menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, serta mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

(Ad)

Peluncuran Poli Heal

Bupati Tegaskan Pemkab Sukabumi Berkomitmen Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



Bupati Sukabumi H.Asep Japar di Acara Peluncuran Poli Heal. (Foto: Ist)

Sukabumuli,Jaya Pos

Bupati Sukabumi Sukabumi H.Asep Japar menegaskan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal itu melalui berbagai layanan dan akses kesehatan yang semakin lengkap bagi masyarakat.

Komitmen tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Hermina Sukabumi yang menghadirkan Poli Heal (Hermina Endocrine Metabolic Obesity and Lifestyle Clinic).

"Layanan Poli Heal ini, tidak sekadar menjadi tempat masyarakat untuk mendapatkan pengobatan, tetapi memperluas akses masyarakat terhadap pelayana kesehatan, serta sarana edukasi, konsultasi, deteksi dini, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," ujar Bupati Sukabumi saat peluncuran Poli Heal sekaligus memperingati Hari Diabetes Sedunia yang dilaksanakan di salah satu hotel di Sukabumi, Rabu, 18 November 2026.

Apalagi menurutnya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak. Hal itu mulai dari rumah sakit, tenaga kesehatan, dunia usaha, keluarga, hingga masyarakat. "Dengan sinergi dan kolaborasi, Insya Allah dapat terwujud masyarakat Kabupaten Sukabumi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Hal itu sebagai salah satu upaya mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah)," ucapnya.

Tak sekadar layanan saja, penerapan pola hidup sehat pun menjadi suatu keharusan. Hal itu termasuk pemeriksaan rutin, salah satunya pemeriksaan rutin diabetes. Apalagi, diabetes merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi tantangan masyarakat dan memerlukan perhatian serius.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Pertamina Hendy Kurniawan mengatakan, rumah sakit yang dipimpinnya terus bertranformasi dendan menyediakan berbagai layanan. Salah satunya penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. "Makanya kami sediakan layanan unggulan khusus Poli Heal. Semoga Kabupaten Sukabumi menjadi pelopor lifestyle yang baik, dan tidak perlu ke tempat yang jauh untuk berkonsultasi," pungkasnya.**(YUD)**

Indeks Inovasi Kota Pasuruan Melonjak

Pemkot Bersama Bapperida Gelar Anugerah Reka Karsa Cipta 2026



Walikota Walikota Pasuruan adi wibowo saat penganugrahan inovasi Kota Pasuruan 2026. (Foto Jaya Pos)

Pasuruan, Jaya Pos

Pemerintah Kota Pasuruan terus mendorong lahirnya berbagai terobosan dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Anugerah Reka Karsa Cipta (RKC) Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kesenian Darmoyudo, Rabu (18/11/2026) petang.

Kegiatan yang diselenggarakan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pasuruan tersebut dihadiri Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Wakil Wali Kota, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan.

Dalam ajang penghargaan sekaligus kompetisi inovasi tahunan ini, terdapat 27 nominator yang terbagi dalam tiga kategori, yakni 10 nominator dari perangkat daerah (OPD), 10 nominator bidang pendidikan, dan 7 nominator dari masyarakat umum.

Capaian inovasi Kota Pasuruan tahun ini menunjukkan perkembangan positif. Indeks inovasi yang sebelumnya berada di angka 54,53 meningkat menjadi 78,12. Peningkatan tersebut mengantarkan Kota Pasuruan naik dari kategori kota inovatif menjadi kota sangat inovatif.

Selain itu, jumlah inovasi yang dikembangkan juga mengalami peningkatan. Jika tahun sebelumnya tercatat 27 nominator, tahun ini jumlah inovasi yang dihasilkan mencapai 145 inovasi.

Dalam kategori perangkat daerah, sejumlah inovasi yang mendapat perhatian di antaranya Risalah Hati (Riwayat Hasil Laboratorium Kesehatan Akurat, Tepat dan Terintegrasi) dari Puskesmas Kebonagung.

Selanjutnya, Siprawan (Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Kota Pasuruan) dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Lentera Bumi (Layanan Terintegrasi Kematian dan Buku Pokok Kematian) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara pada kategori pendidikan, inovasi yang ditampilkan antara lain Juwita Kirana (Jawi Trep Lan Apik Kanggo Ningkataken Karakter Anak) dari SMPN 6 Pasuruan, Mesem (Menyapa Murid Sebelum Memulai Kegiatan Pembelajaran) dari SMPN 4 Pasuruan, serta Lingsebimatik (Lingkungan Sekolah yang Bikin Matematika Jadi Asyik) dari SDN Sebani.

Adapun kategori masyarakat umum, penghargaan terinovatif diberikan kepada Achmad Adidas Wijaya melalui inovasi pemanfaatan limbah kayu jati dari pengrajin mebel Kota Pasuruan menjadi produk home decor, Tangkis-AI (Tanggap Kejahatan Berbasis AI) oleh M. Nasa Shandy Prasto, M.Kom., serta Cookies Patin oleh Dewi Mahmi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo berharap Anugerah Reka Karsa Cipta tidak hanya menjadi agenda penghargaan tahunan, tetapi juga mampu melahirkan inovasi yang benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Anugerah Reka Karsa Cipta tahun 2026 bisa memberikan manfaat di tiga kategori, di tingkat OPD, pendidikan dan umum. Harapannya Bapperida Kota Pasuruan mampu memantau kegiatan ini, sehingga mampu mengimplementasikan sebagai daya inovasi yang bisa diimplementasikan oleh masyarakat," ujar Adi Wibowo.

Ia juga berharap berbagai inovasi yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi instansi maupun lembaga pendidikan yang menciptakannya, tetapi dapat diaplikasikan dan direplikasi oleh berbagai pihak, termasuk daerah lain.

Menurutnya, penyelenggaraan RKC setiap tahun harus menjadi daya ungkit untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Pasuruan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan daerah.

Dengan meningkatnya indeks inovasi menjadi 78,12 dan munculnya 145 inovasi, Pemerintah Kota Pasuruan diharapkan mampu memastikan setiap gagasan tidak berhenti pada kompetisi maupun seremoni penghargaan, melainkan berlanjut menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. **(Wio)**

Pemkot Tangsel Sosialisasikan Pedoman Bangunan Hemat Energi dan Air



Tangerang Selatan, Jaya Pos

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai mendorong penerapan standar bangunan hemat energi dan air melalui sosialisasi Pedoman Teknis Konservasi Energi dan Air pada Bangunan Gedung. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), sosialisasi tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pengembang, pengelola gedung hingga kalangan akademisi.

Kepala DCKTR Kota Tangsel, Ade Sufrizal, mengatakan konservasi energi pada bangunan menjadi langkah strategis untuk menekan konsumsi listrik sekaligus mengurangi emisi karbon.

Berdasarkan Handbook of Energy and Economic Indonesia 2023 yang diterbitkan Kementerian ESDM, sekitar 60 persen konsumsi energi listrik nasional berasal dari sektor bangunan gedung. Sementara itu, sektor tersebut menyumbang sekitar 36 persen dari total emisi karbon Indonesia.

"Besarnya konsumsi energi dan kontribusi emisi dari sektor bangunan membuat intervensi pada sektor ini menjadi salah satu strategi efektif untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca," ujar Ade dalam laporan pelaksanaan kegiatan.

Ia menjelaskan, pedoman teknis yang disusun bersama Kementerian ESDM dengan dukungan Global Buildings Performance Network (GBPN) diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan bangunan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Penyusunan pedoman tersebut melibatkan perangkat daerah, universitas, tenaga ahli, pengembang hingga asosiasi bangunan gedung. Pelibatan berbagai pihak dilakukan agar penerapannya dapat disesuaikan dengan karakteristik pembangunan di Kota Tangsel.

Ade menegaskan, pembangunan gedung ke depan perlu memperhatikan efisiensi penggunaan energi dan air sejak tahap perencanaan, selain mempertimbangkan aspek fisik dan fungsi bangunan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung (PBG) DCKTR Tangsel, Hafidz, mengatakan pedoman tersebut memuat standar minimum efisiensi energi untuk bangunan hunian maupun komersial.

"Jadi bukan hanya bicara pembangunan fisik, tetapi bagaimana bangunan mampu menekan konsumsi energi dan biaya operasional dalam jangka panjang," katanya.

Pedoman tersebut juga diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran, hingga indikator kinerja pemerintah daerah terkait konservasi energi.

Kegiatan diseminasi ini diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan. Pemkot Tangsel berharap penerapan pedoman tersebut dapat mempercepat pembangunan gedung yang hemat energi, efisien, dan berwawasan lingkungan.

(ADV)

Dari Program Impres Jalan Daerah

Pemkab Ciamis Dapat Suntikan Anggaran Rp 21,2 Miliar



Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya dan Kepala PUTRP Ciamis, Taufik Gumelar saat melakukan pemantauan langsung ke lapangan melihat ruas jalan kabupaten yang akan segera direkonstruksi. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis, memperoleh suntikan anggaran infrastruktur sebesar Rp21,245 miliar dari Pemerintah Pusat. Dana tersebut digunakan untuk merekonstruksi dua ruas jalan kabupaten, dengan total panjang penanganan mencapai 5,41 kilometer pada Tahun Anggaran 2026.

Kucuran anggaran melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Nomor 11 Tahun 2025 ini, menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah Tatar Galuh. Selain merekonstruksi jalan rusak, program tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.

Langkah ini menjadi upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar kabupaten, memangkas biaya logistik, serta mendukung program percepatan swasembada pangan dan energi nasional.

Adapun dua lokasi yang mendapat penanganan IJD tersebut, yakni ruas jalan kabupaten Entrong–Pasawahan (batas Kabupaten Pangandaran) sepanjang 3,55 kilometer dengan anggaran Rp 13,745 miliar. Kemudian ruas Emblegan–Jagabaya sepanjang 1,86 kilometer dengan nilai anggaran Rp 7,5 miliar.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Apresiasi tersebut atas dukungan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Ciamis.

Menurutnya, pembangunan jalan memiliki peran penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Terlebih, akses transportasi yang memadai sangat dibutuhkan para petani untuk mendistribusikan hasil produksi mereka. "Selain menghubungkan antar wilayah, jalan yang mantap akan mempermudah mobilitas masyarakat. Selain itu, menekan biaya transportasi dan waktu tempuh para pelaku usaha," ujar Herdiat.

Dari sisi konektivitas, kedua ruas jalan kabupaten di Ciamis tersebut memegang peran yang sangat vital. Seperti jalan Entrong–Pasawahan merupakan jalur strategis penghubung Kabupaten Ciamis dengan Pangandaran, yang terakses langsung ke pasar dan Terminal Banjarsari. Dari total panjang 11,30 kilometer, intervensi program IJD ditargetkan membuat bagian jalan yang ditangani mencapai kondisi mantap 100 persen.

Sementara itu, ruas Emblegan–Jagabaya berfungsi mengikat jaringan jalan nasional yang menghubungkan Ciamis dengan Kabupaten Kuningan. Sekaligus mempermudah akses warga menuju Pasar Panawangan.

Sementara di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Ciamis, Taufik Gumelar, menegaskan bahwa pemerintah daerah turut mengambil bagian dalam pengawasan pelaksanaan proyek tersebut. Meskipun pekerjaan fisik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemkab Ciamis tetap menjalankan fungsi koordinasi dan pemantauan.

Di sisi lain, Pemkab Ciamis berkomitmen untuk terus mengikis kesenjangan infrastruktur wilayah secara bertahap. Langkah ini baik melalui optimalisasi anggaran daerah, maupun memperkuat sinergi dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. "Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat. Adapun pekerjaan tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Akan tetapi kita berkomitmen untuk terus memantau agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar," pungkasnya.

(Mamay)

Sinergi Polres Binjai dan Pujakesuma Diperkuat, Narkoba Jadi Perhatian Bersama

Binjai, Jaya Pos

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., menerima audiensi Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Kota Binjai di Joglo Polres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Binjai, Rabu (18/11/2026) pukul 11.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Binjai menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas kunjungan Pujakesuma Kota Binjai. Ia berharap audiensi sekaligus silaturahmi ini dapat mempererat hubungan serta meningkatkan sinergi antara Polres Binjai dan Pujakesuma dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Binjai," terang AKBP Bimo Moernanda.

Kapolres juga mengajak Pujakesuma untuk bersama-sama mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa.

Polres Binjai turut menyatakan kesiapan memberikan pengamanan dan pelayanan terhadap setiap kegiatan Pujakesuma sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku," ucap Kapolres Binjai.



Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., saat menerima audiensi Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Kota Binjai di Joglo Polres Binjai. (Foto: istimewa)

Ketua Pujakesuma Kota Binjai, Dr. H. Sugianto, S.PoG, MKM, AIFO, MBA, menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Binjai yang telah menerima audiensi dan silaturahmi jajaran pengurus paguyuban. Ia menegaskan bahwa Pujakesuma siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Polres Binjai dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kota Binjai," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pujakesuma juga mengundang Kapolres Binjai beserta jajaran untuk menghadiri kegiatan pengajian yang akan dilaksanakan pada 4 Desember 2026, setelah salat Jumat, di Kecamatan Binjai Selatan.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara Polri dan elemen masyarakat, sehingga bersama-sama dapat menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta menciptakan Kota Binjai yang aman, damai dan kondusif," ucap AKBP Bimo Moernanda. **(Abdul Rachman)**

Komisi III DPRD Langkat Panggil PLN, Bahas Keluhan Listrik di Sejumlah Desa


Rapat Komisi III DPRD Langkat. (Foto/Humas)

Langkat, Jaya Pos

Komisi III DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran PT PLN (Persero) untuk membahas persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Langkat, Kamis (19/11/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, bersama Wakil Ketua Komisi III Edison Tarigan, Sekretaris Komisi III Rahmad Rinaldi dan Anggota Komisi III Juli Fitriadi dan Purwanto tersebut menghadirkan Manajer PLN ULP Tanjung Pura, Manajer PLN ULP Gebang, Manajer PLN ULP Stabat, serta perwakilan PLN UP3 Binjai.

Dalam rapat tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan kelistrikan yang membutuhkan penanganan, mulai dari kebutuhan penambahan tiang dan kabel listrik hingga pemasangan transformator (trafo) serta perbaikan jaringan listrik.

Salah satu keluhan disampaikan warga Dusun B, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang. Masyarakat membutuhkan penambahan tiang listrik dan perbaikan jaringan kabel yang selama ini tersambung dari satu rumah ke rumah lainnya. Kondisi tersebut dikeluhkan menyebabkan tegangan listrik tidak stabil sehingga berpotensi merusak peralatan elektronik milik warga.

Sementara itu, masyarakat Dusun Mulya Bakti, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, mengharapkan pemasangan trafo dan perbaikan jaringan listrik untuk mengatasi persoalan kelistrikan di wilayah tersebut.

Selain itu, Anggota DPRD Langkat, Purwanto, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil reses yang dilakukannya, masyarakat Dusun II, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, juga membutuhkan penambahan tiang listrik.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Pimanta Ginting berharap PLN segera menindaklanjuti setiap persoalan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, keluhan mengenai jaringan listrik tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan kepastian penanganan.

Dalam kesempatan yang sama, Manajer PLN ULP Gebang, Nurshabri, dan Manajer PLN ULP Tanjung Pura, Edwin P. Simatupang, melaporkan bahwa persoalan kelistrikan di wilayah kerja masing-masing yang sebelumnya dibahas dalam RDP Komisi III telah ditangani sesuai dengan hasil rapat terdahulu.

Sementara itu, Manajer PLN ULP Stabat, Dwiyanto Setiawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti keluhan masyarakat di wilayah kerjanya melalui survei lapangan. Hasil survei tersebut kemudian diajukan kepada PLN UP3 Binjai untuk mendapatkan tindak lanjut.

Dwiyanto menjelaskan bahwa kewenangan ULP dalam penambahan tiang listrik terbatas pada pengajuan usulan kepada unit yang berwenang.

Ketiga manajer PLN ULP tersebut juga menegaskan komitmen untuk tetap menerima dan melayani keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui layanan daring.

Pimanta Ginting kemudian meminta PLN UP3 Binjai agar segera menindaklanjuti usulan yang telah disampaikan, mengingat masyarakat telah cukup lama menantikan penyelesaian persoalan tersebut.

Ia secara khusus menyoroti keluhan warga Dusun Mulya Bakti, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat. Menurutnya, persoalan kelistrikan di wilayah tersebut perlu menjadi perhatian serius karena Stabat merupakan ibu kota Kabupaten Langkat. "Apalagi persoalan listrik di Dusun Mulya Bakti, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat. Malu kita kalau ini tidak terealisasi, sebab Kecamatan Stabat merupakan ibu kota Kabupaten Langkat," tegas Pimanta.

Menanggapi hal itu, Hardyansyah selaku perwakilan PLN UP3 Binjai membenarkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah usulan dari PLN ULP. Namun, ia menjelaskan bahwa tidak seluruh usulan dapat direalisasikan secara bersamaan karena pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.

Khusus untuk Desa Karang Rejo, PLN UP3 Binjai berjanji akan memprioritaskan pemasangan trafo terlebih dahulu guna membantu mengatasi persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat. Adapun untuk kebutuhan penambahan 53 tiang listrik di Desa Telaga Jernih, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan menentukan jumlah tiang yang dapat diprioritaskan untuk dipasang.

Hardyansyah juga menyebutkan bahwa PLN merupakan mitra kerja DPRD Kabupaten Langkat. Karena itu, ia berharap komunikasi dan koordinasi antara PLN dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik agar berbagai persoalan kelistrikan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. **(Fatimah)**

Bupati Simalungun Lantik 8 Pejabat Eselon II, Dorong Kinerja dan Pelayanan Publik


Bupati Simalungun Lantik 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemkab Simalungun. (Foto/Rd)

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melantik delapan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Pematang Raya, Rabu (18/11/2026).

Delapan pejabat tersebut ditempatkan pada sejumlah posisi strategis, mulai dari staf ahli bupati, asisten pemerintahan, Sekretaris DPRD hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Adapun pejabat yang dilantik, yakni:

1. Osnidar Marpaung, SH, sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi dan Umum.
2. Albert Riswanto Saragih, SIP, MSi, sebagai Sekretaris DPRD.
3. Ir. Debora Doharma Pinta Ito, MSi, sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
4. Justina Nuriati Purba, SSTP, MSP, sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5. Benfri Betfranke S. Sipayung, ST, MT, sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
6. Firdaus Girsang, SPt, MM, sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
7. dr. Donal Rudi Pangaribuan, MKM, MKes, sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
8. Supardi, SE, sebagai Kepala Dinas Sosial.

Pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong. Prosesnya telah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Nomor 699 Tahun 2026 tertanggal 5 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari pembinaan karier ASN, penguatan kelembagaan, serta upaya meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, baik kepada pimpinan, organisasi, masyarakat, bangsa maupun Tuhan Yang Maha Esa.

"Saya berharap kepada seluruh pejabat yang dilantik agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, loyalitas, dan tanggung jawab, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai rencana," tegas Bupati.

Anton juga meminta seluruh jajaran Pemkab Simalungun memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Menurutnya, mewujudkan visi "Semangat Baru Menuju Simalungun Maju" membutuhkan komitmen, kerja nyata dan kolaborasi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, tidak bisa hanya mengandalkan kepala daerah atau kelompok tertentu. Kerja sama antarlembaga dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.

Kepada delapan pejabat yang baru dilantik, Bupati meminta agar visi dan misi daerah diterjemahkan ke dalam program kerja yang konkret, terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya birokrasi yang adaptif, termasuk memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

"Pekerjaan kita ke depan memang tidak ringan. Kita harus mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas program pembangunan dan pelayanan publik," pungkasnya.

Pejabat Baru Dituntut Buktikan Kinerja

Pelantikan delapan pejabat tersebut menjadi momentum penguatan kinerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Simalungun. Para pejabat dituntut segera menjalankan tugas, mengevaluasi program dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Sejumlah jabatan yang diisi memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebutuhan masyarakat, terutama sektor kesehatan, sosial, transportasi serta pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.

Publik berharap pergantian pejabat tidak sekadar perubahan struktur birokrasi, tetapi diikuti peningkatan kinerja, percepatan pembangunan, transparansi dan pelayanan yang lebih baik.

Integritas dan profesionalisme yang ditekankan Bupati harus diwujudkan dalam kebijakan dan kerja nyata. Dengan demikian, pelantikan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun. **(Rd)**

Antusiasme Warga Belitung dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Bersama Ir. H. Darmansyah Husein

Belitung, Jaya Pos

Sekitar seratus warga Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan antusias mengikuti Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar bersama Anggota MPR RI, Ir. H. Darmansyah Husein, pada Senin (16/11/2026). Kegiatan ini mengangkat tema penting, yaitu "Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat."


Sarasehan Kebangsaan bersama Anggota MPR RI, Ir. H. Darmansyah Husein dengan warga.(Foto/Yus)

Acara berlangsung hangat dan penuh keakraban, dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan warga setempat. Warga tampak sangat tertarik mengikuti paparan materi dan sesi dialog yang berlangsung hingga akhir.

Dalam sambutannya, Darmansyah Husein menekankan pentingnya masyarakat memahami MPR RI tidak sekadar sebagai lembaga negara, tetapi sebagai rumah bersama seluruh rakyat Indonesia. "MPR RI adalah Rumah Kebangsaan. Di sinilah semua perbedaan suku, agama, dan golongan bertemu dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945," ujar Darmansyah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan peran MPR sebagai Pengawal Konstitusi yang menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, MPR juga menjadi Penjaga Kedaulatan Rakyat karena anggota-anggotanya adalah representasi rakyat seluruh Indonesia.

Darmansyah, yang dikenal luas sebagai mantan Bupati Belitung selama 10 tahun dan mantan anggota DPD RI dua periode, mendapat apresiasi besar dari masyarakat berkat pengalamannya yang mumpuni di pemerintahan dan lembaga negara.

Dalam sesi dialog, beberapa warga menyampaikan harapan agar Darmansyah Husein maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pilkada 2029 mendatang. "Kami ingin beliau maju sebagai Calon Gubernur Babel. Pengalamannya sudah terbukti dengan 10 tahun memimpin Belitung dan dua periode di DPD RI. Kami yakin beliau mampu membawa Babel lebih maju," ungkap salah satu warga.

Menanggapi harapan tersebut, Darmansyah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan berharap sarasehan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan cinta yang lebih besar terhadap bangsa dan negara. "Kalau rakyat paham konstitusinya, rakyat akan kuat. Kalau rakyat bersatu, Indonesia akan maju," tambahnya. Acara ditutup dengan foto bersama dan dialog santai antara warga dan Darmansyah Husein sebagai bentuk keakraban dan kebersamaan. **(Yustami)**

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

Dua Penghargaan Nasional Kemenkes ..... *Halaman 1*

kan sekadar pencapaian administratif, melainkan bentuk apresiasi atas berbagai upaya nyata yang dilakukan Pemko Padang Panjang dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan. Capaian ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan menjadi salah satu perhatian penting dalam agenda pembangunan daerah.

Penghargaan pertama, yakni Cakupan CKG Sekolah Tertinggi Regional Barat, merupakan pengakuan atas keberhasilan Padang Panjang dalam melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta didik. Capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak memperoleh akses pemeriksaan kesehatan sejak dini.

Melalui program CKG Sekolah, pemerintah berupaya mendeteksi berbagai potensi gangguan kesehatan pada peserta didik sedini mungkin. Pemeriksaan kesehatan menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi anak, sehingga apabila ditemukan permasalahan kesehatan, dapat segera dilakukan tindak lanjut dan penanganan sesuai kebutuhan.

Program ini juga mencerminkan perhatian Pemko Padang Panjang terhadap kualitas generasi muda. Anak-anak yang sehat merupakan modal penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Keberhasilan pelaksanaan CKG Sekolah tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak. Dinas Kesehatan bersama puskesmas, tenaga kesehatan, pihak sekolah, serta unsur terkait lainnya terus membangun koordinasi agar pelaksanaan pemeriksaan dapat menjangkau peserta didik secara optimal.

Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan program kesehatan tidak hanya berjalan sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak usia sekolah.

Sementara itu, penghargaan kedua dalam kategori Kabupaten/Kota Tidak Ada Kematian Ibu menjadi pengakuan atas capaian pelayanan kesehatan ibu di Padang Panjang. Prestasi ini menunjukkan pentingnya kesinambungan pelayanan kesehatan bagi perempuan, khususnya selama masa kehamilan, persalinan, hingga setelah melahirkan.

Upaya menjaga keselamatan ibu dilakukan melalui berbagai tahapan pelayanan, mulai dari pemeriksaan kehamilan secara berkala, pemantauan ibu hamil dengan risiko tinggi, kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan, hingga penyediaan pelayanan persalinan yang aman.

Selain itu, kesiapan sistem rujukan medis juga menjadi bagian penting dalam memastikan ibu hamil yang membutuhkan penanganan khusus dapat memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat. Sinergi antara fasilitas kesehatan, tenaga medis, bidan, dan seluruh unsur pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung keselamatan ibu.

Capaian tidak adanya kematian ibu tersebut menjadi gambaran pentingnya pelayanan kesehatan yang mengedepankan pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan, dan respons yang tepat terhadap berbagai risiko selama kehamilan maupun persalinan.

Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Padang Panjang berhasil meraih dua penghargaan nasional tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan banyak unsur dalam sistem pelayanan kesehatan daerah.

Secara khusus, Wali Kota memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran, rumah sakit, puskesmas, dokter, bidan, tenaga kesehatan, kader kesehatan, pihak sekolah, serta seluruh pihak yang selama ini konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Hendri, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup hanya diukur melalui penghargaan yang diterima pemerintah daerah. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan.

Karena itu, ia berharap dua penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi, dan menghadirkan berbagai inovasi di bidang kesehatan.

"Saya harap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, bukan justru membuat seluruh jajaran berpuas diri. Penghargaan bukanlah tujuan akhir. Hal terpenting adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan kesehatan, mulai dari anak-anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dini, ibu hamil yang memperoleh pendampingan dan pelayanan aman, hingga masyarakat yang semakin mudah mengakses fasilitas kesehatan," ujarnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Pemko Padang Panjang berkomitmen terus memperkuat pembangunan sektor kesehatan melalui peningkatan kualitas fasilitas pelayanan, pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, serta perluasan program promotif dan preventif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan kesehatan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ke depan, berbagai program kesehatan akan terus didorong agar tidak hanya berorientasi pada penanganan penyakit, tetapi juga mengutamakan pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Dengan demikian, pembangunan kesehatan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dua penghargaan nasional dari Kementerian Kesehatan ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi Pemerintah Kota Padang Panjang. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendri Arnis, capaian tersebut diharapkan semakin memperkuat semangat seluruh jajaran untuk menjaga kualitas pelayanan, mempertahankan prestasi, dan terus menghadirkan pembangunan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat.

Bagi Pemko Padang Panjang, prestasi ini bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dengan kolaborasi, dedikasi tenaga kesehatan, serta komitmen pemerintah daerah, Padang Panjang terus berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan memiliki kualitas hidup yang semakin baik.

(Zakirman/ADV)

Satlantas Polres Way Kanan Pasang Banner ..... *Halaman 1*

kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Way Kanan AKP Rudy Apriansyah Unyi mengatakan, pemasangan banner tersebut menjadi salah satu upaya mengingatkan pengguna jalan agar lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Dalam kegiatan itu, petugas mengimbau pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan.

Selain memasang banner, personel Satlantas juga memberikan edukasi secara langsung kepada pengguna jalan. Edukasi tersebut mencakup pentingnya etika berlalu lintas, penggunaan kendaraan secara aman, serta risiko kecelakaan akibat pelanggaran aturan.

Menurutnya, kegiatan preemtif ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan disiplin dalam berkendara.

Melalui Operasi Zebra Krakatau 2026, Satlantas Polres Way Kanan berharap kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta kondisi jalan yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan. **(Suhaili)**

RUU Perampasan Aset Disahkan..... *Halaman 1*

tan di tengah tuntutan efisiensi anggaran, terlebih Kejaksaan Agung telah memiliki Badan Pemulihan Aset (BPA).

RUU Perampasan Aset dibahas sejak Agustus 2025 melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke 15 provinsi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan RUU tersebut lebih cepat dari target kelompok masyarakat sipil, yakni 15 Desember 2026. Menurutnya, percepatan bukan berarti DPR terburu-buru, melainkan karena regulasi tersebut sudah lama diusulkan dan mendesak diselesaikan.

Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Kewenangan tersebut membutuhkan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Karena itu, DPR memasukkan ketentuan pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan pengawas akan ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPR, mekanisme yang dinilai serupa dengan pengisian lembaga independen seperti KPK dan Komisi Yudisial.

Namun, keberadaan lembaga yang selama ini mengelola aset hasil tindak pidana menjadi persoalan tersendiri.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memiliki BPA yang bertugas mengelola aset hasil tindak pidana. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, sebelumnya menyebut lembaga tersebut telah menunjukkan hasil, antara lain melalui lelang BPA Fair yang menghasilkan penjualan lebih dari Rp1 triliun dalam satu kali lelang.

Pernyataan itu disampaikan saat Komisi III DPR membahas urgensi pembentukan badan khusus pengelola aset rampasan. Namun, Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menilai Kejagung belum memiliki rekam jejak memadai karena tugas utamanya berada di bidang penegakan hukum.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan persoalan pembagian kewenangan. DPR menganggap badan khusus diperlukan, sedangkan Kejagung menyatakan telah memiliki lembaga yang menjalankan fungsi pengelolaan aset.

Penguatan Lembaga Lama Bisa Jadi Alternatif

Persoalan pengelolaan aset tindak pidana berkaitan dengan pembagian kewenangan antarlembaga. Selama ini, tugas tersebut tersebar di sejumlah institusi sehingga membutuhkan koordinasi.

Mantan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Palu, Surya Hadi Purnama, pernah mengulas persoalan itu dalam artikel "Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana" yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada 17 Desember 2021.

Surya menguraikan dua pilihan kelembagaan, yakni membentuk lembaga baru atau memperkuat lembaga yang sudah ada.

"Berdasarkan pertimbangan efisiensi, opsi pertama telah disepakati untuk tidak dipilih," tulis Surya.

Ia menawarkan pembentukan unit khusus pada institusi yang ditunjuk sebagai pengelola aset tindak pidana. Unit tersebut dapat memberikan dukungan teknis dan non-teknis tanpa mengambil alih kewenangan lembaga lain.

Kementerian Keuangan dinilai dapat menjadi pilihan karena memiliki kewenangan mengelola barang milik negara serta jaringan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di berbagai wilayah.

Gagasan tersebut menunjukkan pembentukan lembaga baru bukan satu-satunya jalan memperbaiki pengelolaan aset. Penguatan unit khusus pada institusi yang memiliki kapasitas dapat meningkatkan koordinasi tanpa menambah birokrasi.

Pemerintah dan DPR perlu memastikan pembagian kewenangan dalam UU Perampasan Aset jelas. Efektivitas lembaga dan penggunaan anggaran harus diperhatikan agar kebijakan baru tidak menimbulkan tumpang tindih.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kecenderungan membentuk lembaga baru setiap kali undang-undang disahkan menunjukkan persoalan tata kelola kelembagaan.

Menurut Trubus, pembentukan lembaga baru sering diikuti kebutuhan membentuk lembaga pengawas. Jika terus berulang, hal itu berpotensi memperpanjang birokrasi.

Ia menilai pemerintah dan DPR cenderung membentuk institusi baru tanpa mengevaluasi lembaga yang sudah ada. Padahal, evaluasi diperlukan untuk menentukan apakah institusi lama masih efektif atau membutuhkan penguatan kewenangan dan sumber daya.

Trubus mencontohkan KPK dan Ombudsman sebagai lembaga yang menurutnya perlu dievaluasi. Tanpa evaluasi, pembentukan institusi baru berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan perebutan peran.

Selain itu, badan baru berpotensi meningkatkan risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah harus menyiapkan anggaran, sumber daya manusia, serta operasional lembaga tersebut. **(Red)**

Gubernur Sumatera Barat Bersama Wawako ..... *Halaman 1*

Dalam pidato sambutan Reti Wafda selaku pembuka acara menyampaikan apresiasi dan penghargaan tertinggi dari Pemprov Sumbar kepada Pemerintah kota(Pemko), LPTQ, Panitia, dan masyarakat Bukittinggi dalam penyelenggaraan MTQ tersebut.

"Pelaksanaan MTQ ke 42 ini adalah wujud nyata komitmen kita bersama dalam menjaga tradisi keagamaan dan membangun masyarakat yang religius", paparnya.

Ditambah Reti Wafda tentang beberapa pesan dan arahan dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah diantaranya menyampaikan, "MTQ ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan membaca dan menghafal Al Qur'an, namun MTQ adalah sarana untuk membumingkan Al Qur'an dalam kehidupan sehari hari", terangnya

Hal senada disampaikan Wawako Bukittinggi Ibnu Asis dalam pidato sambutannya tentang pelaksanaan perhelatan akbar MTQ di kota wisata ini, "Pemko Bukittinggi turut mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tulus kepada panitia pelaksana, LPTQ, Departemen agama, Ninik Mamak, dan seluruh masyarakat yang telah bekerjasama dan berpartisipasi dalam persiapan acara yang kita muliakan ini", ucap Ibnu .

Dilanjut Ibnu," Dalam semangat MTQ ini , mari kita tingkatkan kecintaan terhadap Al Qur'an untuk menjadikan generasi Bukittinggi yang gemilang", paparnya lagi.

Ditambahkan Ibnu," Al Qur'an tetap menjadi kompas utama dikehidupan, bagi masyarakat Minangkabau bukan hal yang asing menjunjung tinggi Al Qur'an melainkan ruh dan filosofi adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabulah", tuturnya. Pergelaran acara tersebut turut dimeriahkan oleh marching band dari sekolah MTSN 1 kota Bukittinggi. **(Denny/ADV)**

Pemkab Deli Serdang Bedah 7 Rumah Warga ..... *Halaman 1*

Peresmian Kampung Berkah digelar di Gang Bayur Dalam, Selasa (17/11/2026). Dalam kegiatan itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyerahkan kunci tujuh rumah yang telah direnovasi kepada keluarga penerima manfaat.

Selain mendapatkan rumah layak huni, para penerima bantuan juga memperoleh fasilitas pengurusan dokumen secara gratis. Fasilitas tersebut meliputi sertifikat tanah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PBB Rp0.

Tujuh keluarga penerima manfaat program tersebut yakni Fitriani Daulay, keluarga almarhum Mansyur/Maslina Lubis, Suparman, Edi Ardiansyah Wijaya, M. Yusuf Orlando, Ambong, dan Saiful Ali Nasution. Seluruh penerima berasal dari kelompok desil 1 hingga 4.

Penataan kawasan kumuh itu tidak hanya mencakup renovasi rumah dan perbaikan jalan lingkungan. Pemkab Deli Serdang juga menyerahkan tong sampah kepada Kepala Lingkungan IV dan V serta alat pemadam api ringan (APAR) kepada relawan pemadam kebakaran (Redkar).

Selain itu, dilakukan penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis bagi pekerja rentan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Asri Ludin Tambunan juga melakukan peletakan batu pertama renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Dusun III, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua. Rumah milik Amar Hidayat dan istrinya, Elvi, itu akan direnovasi menggunakan Dana Desa. Program tersebut merupakan bagian dari gerakan satu desa satu bedah rumah yang digagas Bupati Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo.

Melalui program tersebut, penerima bantuan juga akan mendapatkan fasilitas pengurusan dokumen kepemilikan rumah, termasuk sertifikat tanah dan pembebasan PBB atau PBB Rp0. **(Ramdani)**

Padang Panjang Raih Penghargaan Nasional ..... *Halaman 1*

informasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mendorong berbagai inovasi digital di lingkungan Pemerintah Kota. Menurutnya, kolaborasi seluruh perangkat daerah diperlukan agar pengembangan teknologi dan digitalisasi pemerintahan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan."Peran Diskominfo dinilai strategis dalam memperkuat integrasi data, mengembangkan sistem informasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi,"ujar wako.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat (SIKEMAS). Inovasi ini dilakukan melalui pemadanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Melalui pemadanan tersebut, Pemko dapat memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang disesuaikan dengan data kependudukan. Informasi ini menjadi salah satu bahan dalam perencanaan program, penentuan sasaran bantuan sosial, serta penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan Smart City 2026 ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemko untuk terus menghadirkan inovasi, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Pemko berkomitmen melanjutkan transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Zakirman/ADV)



PENGUMUMAN

Bahwa dengan ini PT LEGALITAS GRAHA KARYA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, mengumumkan kepada pihak yang berkepentingan dan seluruh karyawan Para Pihak, bahwa PT MALUM GLOBAL INVESTAMA dan PT SHIFRA ARTANI INVESTAMA akan melakukan pengambilalihan saham atas PT LEGALITAS GRAHA KARYA melalui pengalihan hak atas saham langsung dari para pemegang saham, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.

Pengumuman ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Para Kreditur, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau tanggapan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 19 November 2026

Direksi
PT LEGALITAS GRAHA KARYA

PENGUMUMAN

Bahwa dengan ini PT TRANS KAPAL LOGISTIK, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, mengumumkan kepada pihak yang berkepentingan dan seluruh karyawan Para Pihak, bahwa PT MALUM GLOBAL INVESTAMA dan PT SHIFRA ARTANI INVESTAMA akan melakukan pengambilalihan saham atas PT TRANS KAPAL LOGISTIK melalui pengalihan hak atas saham langsung dari para pemegang saham, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.

Pengumuman ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Para Kreditur, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau tanggapan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 19 November 2026

Direksi
PT TRANS KAPAL LOGISTIK

PENGUMUMAN

Bahwa dengan ini PT BINTANG PUSUK BUHIT, berkedudukan di Jakarta Timur, mengumumkan kepada pihak yang berkepentingan dan seluruh karyawan Para Pihak, bahwa PT MALUM GLOBAL INVESTAMA akan melakukan pengambilalihan saham atas PT BINTANG PUSUK BUHIT melalui pengalihan hak atas saham langsung dari para pemegang saham, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.

Pengumuman ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Para Kreditur, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau tanggapan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 19 November 2026

Direksi
PT BINTANG PUSUK BUHIT

Pro dan Kontra Tambang Timah di Laut Olivir Belitung Timur, Masyarakat Menanti Ketegasan Pemerintah Pusat

Belitung, Jaya Pos

Rencana beroperasinya tambang timah di Laut Olivir, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih memicu pro dan kontra yang tajam di kalangan masyarakat. Warga pesisir kini menunggu keputusan tegas dari Pemerintah Pusat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan menghindari konflik horizontal.

Laut Olivir selama ini dikenal sebagai wilayah tangkap utama bagi nelayan tradisional Belitung Timur dan sudah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata serta zona nol tambang melalui Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) hingga tahun 2040. Namun, wacana revisi RZWP3K yang dapat membuka kembali zona tambang di laut ini membuat masyarakat pesisir merasa resah.

Penolakan keras datang dari para nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Belitung Timur, dan



Mantan Bupati Belitung Ir Darmansyah Husien (Tengah) saat diwawancarain JAPOS.CO. (Foto/Yus)

enam desa pesisir, yaitu Desa Padang, Lalang, Baru, Selinsing, Gantung, dan Buku Limau. Mereka menegaskan status zona nol tambang harus dipertahankan.

Nilai potensi perikanan di Laut Olivir yang berkelanjutan diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar per tahun dari hasil cumi, rajungan, dan ikan karang, menjadi tulang punggung kehidupan ribuan nelayan.

Nelayan khawatir tambang timah hanya memberikan pemasukan sekali habis sekitar Rp500 juta, sementara kerusakan dan biaya reklamasi laut bisa mencapai Rp1 miliar dengan efek kerusakan padang lamun hingga satu hektare setiap hari. Kerusakan terumbu karang, abrasi pesisir, dan sedimentasi pasir pantai menjadi ancaman serius.

Penolakan mereka juga berlandaskan hukum, seperti Perda No. 3 Tahun 2020, Perpres 17 Tahun 2024 yang menetapkan Olivir sebagai Kawasan Terpadu Pariwisata Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2014 yang melarang izin tambang yang tidak sesuai RZWP3K.

Di sisi lain, sebagian warga menilai tambang timah, baik di darat maupun laut, masih menjadi sumber ekonomi penting dan lapangan kerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan ongkos melaut yang mahal. Para penambang kecil menginginkan kepastian hukum dan pengawasan ketat, bukan pembiaran aktivitas tambang ilegal yang semakin marak, termasuk pungutan liar yang membebani mereka.Ir. Darmansyah Husien, mantan Bupati dan putra kelahiran Desa Gantung, meminta Pemerintah Pusat dan Kementerian ESDM segera memberikan kepastian hukum.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu keputusan final agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. **(Yustami)**

Bupati Mojokerto Tinjau Pelebaran Jalan Panjer-Seduri, Dorong Ekonomi dan Atasi Kemacetan

Mojokerto, Jaya Pos

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa meninjau progres pelebaran Jalan Panjer-Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Proyek tersebut dilakukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pelebaran jalan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengantisipasi meningkatnya volume kendaraan, sekaligus memperlancar mobilitas warga, aktivitas perdagangan, dan akses menuju fasilitas pendidikan.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Albarraa didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Yuni Laili Faizah, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Mojosari, serta para lurah.

Bupati Albarraa mengatakan, pelebaran Jalan Panjer-Seduri memiliki peran strategis dalam mengurai kemacetan di kawasan Mojosari. Selain menunjang aktivitas perekonomian, jalan tersebut juga menjadi akses penting bagi masyarakat menuju sekolah dan Pasar Mojosari.

"Pelebaran jalan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan yang ada di Mojosari, sekaligus menunjang akses menuju sekolah, termasuk MTs Negeri 1 Mojokerto dan SMA Negeri 1 Mojosari. Jalan ini juga menjadi akses menuju Pasar Mojosari serta mendukung perekonomian masyarakat secara umum," ujarnya.



Bupati saat meninjau progres pelebaran jalan di Mojosari. (Foto: ist)

Menurutnya, sebelum dilakukan pelebaran, Jalan Panjer-Seduri hanya memiliki lebar sekitar empat meter. Kini, setelah dilakukan peningkatan, lebar jalan mencapai enam hingga tujuh meter sehingga diharapkan mampu memberikan ruang lebih luas bagi kendaraan yang melintas dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Pelebaran jalan tersebut direncanakan sepanjang 1,4 kilometer dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada 4 Juni 2026 hingga 31 Oktober 2026, dengan panjang ruas yang dikerjakan sekitar 680 meter.

Sementara itu, pekerjaan tahap kedua akan dilanjutkan pada awal tahun anggaran 2027 dengan panjang sekitar 700 meter. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menargetkan seluruh ruas pelebaran dapat diselesaikan sehingga manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain pelebaran Jalan Panjer-Seduri, Bupati Albarraa juga menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur strategis lainnya, yakni revitalisasi Jembatan Turi di Desa Leminggir, Kecamatan Mojosari.

Jembatan tersebut merupakan akses penghubung Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Sidoarjo. Revitalisasi diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp74 miliar hingga Rp75 miliar yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan maupun jembatan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. **(Ad)**

Respons Cepat Laporan Warga, Polsek Tanjung Pura Tindak Lokasi Diduga Jadi Tempat Penyalahgunaan Narkotika

Langkat, Jaya Pos

Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Polsek Tanjung Pura, Polres Langkat, bergerak cepat melakukan penindakan di Dusun II Paluh Nipah, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pura, IPDA Armalis, S.H., M.H., bersama sejumlah personel, atas perintah Kapolsek Tanjung Pura, AKP Donny Pance Simatupang, S.H., M.H.

Langkah tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya lokasi di kawasan perladangan kelapa sawit yang diduga kerap digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika.



Barak narkoba di Desa Pematang Cengal di grebek dan dimusnahkan Polsek Tanjung Pura. (foto/ Humas Polres Langkat)

Setibanya di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa lima buah bong atau alat isap yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu, 10 klip plastik bening kosong yang diduga bekas kemasan narkotika jenis sabu, serta satu unit gubuk beratapkan tenda plastik berwarna biru.

Selanjutnya, Kanit Reskrim menghubungi Kepala Dusun II Paluh Nipah, Mahyuddin, untuk bersama-sama menyaksikan penanganan di lokasi. Dengan disaksikan kepala dusun setempat, petugas kemudian melakukan pemusnahan terhadap gubuk yang diduga dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Kepala Dusun II Paluh Nipah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polres Langkat, khususnya Polsek Tanjung Pura, atas respons cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.

Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., Melalui Kapolsek Tanjung Pura AKP Donny Pance Simatupang menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus merespons setiap informasi dan laporan masyarakat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Polsek Tanjung Pura juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. **(AN)**

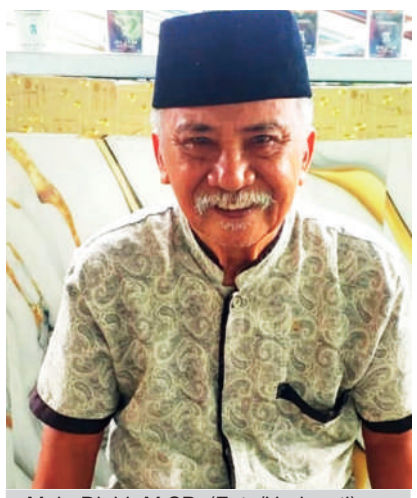
Dorongan Warga Menguat, Moh. Djahir M.SP. Siap Kembali Bertarung di Pilkades Kalangkangan 2027

Tolitoli, Jaya Pos

Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 mulai menghangat di Desa Kalangkangan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Sejumlah nama mulai diperbincangkan masyarakat, termasuk Moh. Djahir M.SP. yang menyatakan kesiapannya untuk kembali maju dalam kontestasi pemilihan kepala desa untuk ketiga kalinya.

Keinginan Moh. Djahir kembali mencalonkan diri disebut berangkat dari dorongan dan aspirasi sejumlah warga yang berharap dirinya bersedia melanjutkan pengabdian serta memimpin Desa Kalangkangan pada periode mendatang.

Menurut Moh. Djahir, permintaan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama yang mendorong dirinya untuk kembali memikirkan langkah politik tersebut. Ia mengaku, dukungan dan harapan warga yang terus disampaikan kepadanya membuat keinginan untuk maju kembali semakin kuat.



Moh. Djahir M.SP. (Foto/Hariyanti)

Namun, rencana tersebut bukan tanpa pertimbangan keluarga. Moh. Djahir mengungkapkan, sang istri, Dahlia, sebenarnya berharap dirinya tidak lagi mengikuti kontestasi Pilkades. Meski demikian, besarnya dorongan masyarakat membuatnya kembali mempertimbangkan untuk maju demi melanjutkan pengabdian kepada desa.

Baginya, Pilkades bukan sekadar ajang perebutan jabatan, melainkan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan dan program pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi.

Moh. Djahir menegaskan, apabila kembali mendapat kepercayaan masyarakat dan terpilih sebagai kepala desa, dirinya ingin menuntaskan sejumlah program yang sebelumnya belum terlaksana. Ia berharap rencana pembangunan yang masih tertunda dapat diwujudkan secara bertahap demi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Desa Kalangkangan agar tetap menjaga persatuan, kerukunan, dan kebersamaan, meskipun nantinya terdapat perbedaan pilihan dalam Pilkades 2027.

Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut merusak hubungan persaudaraan dan keharmonisan di tengah masyarakat.

Dengan menyatakan kesiapan untuk kembali maju, Moh. Djahir kini menjadi salah satu nama yang mulai diperbincangkan dalam dinamika politik desa menjelang Pilkades Kalangkangan 2027.

(Hariyanti)

Lurah Pakuhaji Mengaku Telah Instruksikan Penerapan K3,

Namun Pekerja Proyek Diduga Masih Abaikan Keselamatan



M .Sanusi ,SH.M.Si Lurah Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Tangerang Banten. (Foto/Abd)

Tangerang, Jaya Pos

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek wilayah Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan. Pasalnya, meski pihak kelurahan mengaku telah memberikan instruksi agar pekerja menggunakan perlengkapan keselamatan, sejumlah pekerja di lapangan diduga masih mengabaikan penggunaan alat pelindung diri (APD).

Lurah Pakuhaji, M. Sanusi, S.H., M.Si., menanggapi informasi terkait dugaan lemahnya penerapan K3 di lokasi proyek tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak kelurahan telah turun ke lapangan dan memberikan arahan kepada para pekerja agar memperhatikan keselamatan kerja.

Melalui pesan WhatsApp pada Minggu (8/11/2026), M. Sanusi menyampaikan bahwa penggunaan perlengkapan keselamatan telah diinstruksikan kepada pekerja saat tim kelurahan melakukan kunjungan ke lokasi.

"Terima kasih atas informasinya. Waktu tim kelurahan ke lapangan sudah diarahkan untuk memakai K3," ungkap M. Sanusi.

Namun, hasil pantauan tim media di lokasi proyek menunjukkan bahwa sejumlah pekerja diduga masih belum menggunakan APD secara memadai sesuai potensi risiko pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan serta kepatuhan pelaksana proyek terhadap instruksi keselamatan yang telah disampaikan.

Jika arahan penggunaan K3 sudah diberikan, mengapa masih ditemukan pekerja yang diduga tidak menggunakan perlengkapan keselamatan? Sejauh mana pengawasan kontraktor maupun penanggung jawab proyek dilakukan untuk memastikan instruksi tersebut benar-benar dipatuhi?

Penerapan K3 bukan sekadar formalitas atau pemenuhan administrasi proyek. Keselamatan kerja merupakan aspek mendasar yang harus menjadi perhatian serius, terutama dalam pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan, mulai dari tertimpa material, terjatuh, hingga cedera akibat peralatan kerja.

Penggunaan APD seperti helm keselamatan, sepatu pelindung, rompi keselamatan, sarung tangan maupun perlengkapan lainnya harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya di lapangan.

Pernyataan Lurah Pakuhaji yang mengaku telah memberikan arahan menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan keselamatan pekerja. Namun, instruksi semata tidak cukup apabila tidak diikuti pengawasan berkelanjutan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Pihak kontraktor dan pelaksana proyek perlu memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlengkapan keselamatan yang memadai, memahami prosedur kerja aman, serta menggunakan APD selama menjalankan aktivitas pekerjaan.

Apabila dugaan ketidakpatuhan terhadap standar K3 tersebut terbukti, instansi berwenang diharapkan melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Keselamatan pekerja tidak boleh dikorbankan demi mengejar target penyelesaian proyek. Pengawasan yang lemah dan kepatuhan yang rendah terhadap standar keselamatan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja yang seharusnya dapat dicegah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor maupun penanggung jawab proyek belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tim media mengenai dugaan pekerja yang tidak menggunakan APD.

Publik berharap instruksi yang telah disampaikan Lurah Pakuhaji tidak berhenti sebatas imbauan, melainkan diwujudkan dalam penerapan K3 secara nyata di lapangan. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dalam pelaksanaan proyek. **(Abd)**

MARI BERSAMA PERANGI NARKOBA

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

JAPOS.CO
Email:japos@yahoo.com
TERVERIFIKASI DEWAN PERS

SENIN: EDISI 867 TAHUN XX, 23 - 29 NOVEMBER 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

BAZNAS Ciamis Raih Tujuh Kategori Penghargaan Pada Ajang Apresiasi BAZNAS Jabar Award 2026

Ciamis, Jaya Pos

Prestasi penomenal di penghujung akhir tahun kembali ditorehkan BAZNAS Kabupaten Ciamis atas konsistennya dalam pengelolaan dana titipan umat tersebut, sekaligus sebagai kado terindah bagi pemerintah Kabupaten Ciamis.

Bukan sekadar penghargaan, lembaga pengelola zakat ini kembali mengukuhkan prestasinya di tingkat Jawa Barat dengan meraih predikat Juara Umum Apresiasi BAZNAS Jabar Award 2026 sekaligus memborong tujuh penghargaan kategori.

Pengakuan serupa turut diberikan kepada Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, sebagai Kepala Daerah Pendukung Zakat. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penganugerahan di Grand Asrilia Hotel & Restaurant, Bandung, Kamis (19/11).

Capaian ini sekaligus mengulang keberhasilan BAZNAS Ciamis yang sebelumnya pernah meraih predikat Juara Umum pada ajang serupa tahun 2022. Bagi BAZNAS Ciamis, prestasi tersebut menjadi penanda perjalanan panjang membangun tata kelola zakat yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Tujuh kategori penghargaan yang berhasil diraih meliputi Tata Kelola dan Kepatuhan Lembaga Terbaik, Dukungan Regulasi Terbaik, Pengelolaan SDM Terbaik, Pengelolaan Hibah APBD Terbaik, Kemitraan Strategis Terbaik, Kepala Daerah Pendukung Zakat, serta BAZNAS Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik.

Dominasi di tujuh kategori tersebut mengantarkan BAZNAS Ciamis menjadi Juara Umum. Sebuah pencapaian yang sekaligus menjadi apresiasi atas kerja kolektif jajaran amil, dukungan pemerintah daerah, serta kepercayaan masyarakat yang selama ini menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS.

Di luar capaian kelembagaan tersebut, Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya juga memperoleh penghargaan khusus sebagai Kepala Daerah Pendukung Zakat. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan regulasi, pemberian dana hibah, serta keterlibatan aktif Bupati dalam berbagai kegiatan BAZNAS

Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat tata kelola

▸▸Halaman 11



Mewakili Bupati Ciamis Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum Setda Ciamis, Wawan Ruhiyat bersama jajaran pengurus BAZNAS Ciamis ketika menerima penghargaan dalam apresiasi BAZNAS Jabar Award 2026. (Foto:Mamay)

6.000 SPPT Masih Atas Nama Developer, Realisasi PBB Moncongloe Maros Baru 39 Persen

Maros, Jaya Pos

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, masih tergolong rendah. Hingga evaluasi terakhir, penerimaan PBB di wilayah tersebut baru mencapai 39 persen dari target yang ditetapkan.

Rendahnya capaian itu dipengaruhi sejumlah kendala, mulai dari wajib pajak yang tidak berdomisili di lokasi objek pajak hingga persoalan administrasi kepemilikan properti. Bahkan, sekitar 6.000

▸▸ Halaman 11



Koordinasi langkah penagihan yang jitu. (Foto/Hakim)

Pemkab Labuhanbatu Gandeng Kejari, Perkuat Integritas ASN dan Pencegahan Korupsi

Labuhanbatu, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas penyimpangan melalui Workshop Integritas Aparatur serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu.

Kegiatan berlangsung di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jalan WR Supratman, Senin (16/11/2026). MoU bidang Perdata dan Tata Usaha

▸▸ Halaman 11



Bupati Labuhanbatu dr, Hj, Maya Hasmita Sp,OG,M,KM. Bersama Wakil Bupati H, Jamri ST, dan Kajati. (Foto : Kominfo)

Bupati Simalungun Hadiri Hari Bakti ke-2 Imipas, Tekankan Pembinaan Warga Binaan

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri peringatan Hari Bakti ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Tahun 2026 di Lapangan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan berlangsung khidmat melalui upacara dan tasyakuran dengan mengusung tema *"Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina."*

Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian, profesionalisme, serta sinergi antara jajaran Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Imigrasi II Simalungun, Benyamin Kali Harahap, bersama Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, Sangapta Surbakti, menegaskan pentingnya menjadikan Hari Bakti sebagai sarana evaluasi dan penguatan komitmen dalam menjalankan tugas.



Hadiri Hari Bakti ke 2 Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Bupati Simalungun Tekankan Pembinaan Humanis dan Si Nergi Lintas Instansi. (Foto/Rd)

Tema yang diusung mencerminkan tiga prinsip utama, yakni pelayanan yang profesional, responsif dan transparan; penegakan hukum yang tegas dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan; serta pembinaan warga binaan secara tulus agar mampu memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Anton Saragih mengapresiasi dedikasi petugas Imigrasi dan Pemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana.

Menurutnya, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.

"Setiap warga binaan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri, mengasah keterampilan, dan menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Ketika kembali ke masyarakat,

▸▸ Halaman 11

Imigrasi Garut Deportasi WNA Pakistan, Diduga Berikan Keterangan Tidak Benar untuk Visa Investor

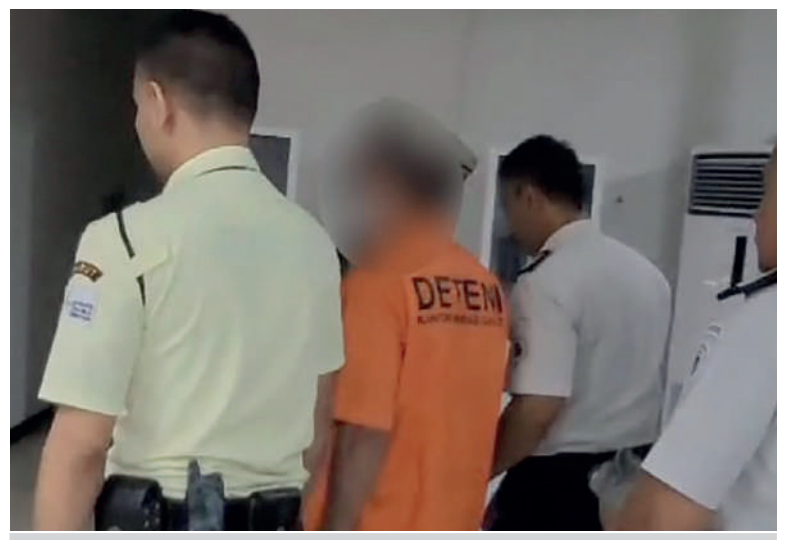
Garut, Jaya Pos

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang diduga memberikan keterangan tidak benar saat mengajukan visa investor. Tindakan tegas tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia.

Kasubsi Humas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Zulfikar, mengatakan deportasi dilaksanakan pada 23 Oktober 2026 setelah melalui proses pemeriksaan dan administrasi keimigrasian.

Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing dilakukan di wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang guna memastikan kepemilikan izin tinggal masih berlaku serta aktivitas yang dilakukan sesuai dengan jenis izin tinggal yang diberikan.

Dalam operasi pengawasan tersebut, petugas mengamankan WNA Pakistan di sebuah tempat makan di Jalan Bank, Kabupaten Garut. Yang bersangkutan diketahui memiliki Izin Tinggal Investor dengan indeks E28A yang berlaku



Warga negara asing asal Pakistan dideportasi. (Foto/Har)

hingga 8 April 2028.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, WNA tersebut diduga tidak memiliki maupun menjalankan usaha sebagaimana dilaporkan saat mengajukan Visa Investor. Kondisi itu menimbulkan dugaan adanya pemberian keterangan tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan disangkakan melanggar Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selanjutnya, WNA tersebut diamankan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut dan ditempatkan sementara di ruang detensi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses administrasi

▸▸ Halaman 11



Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Pesantren, Ahmad Fahrur Rozi. (Foto:Mamay)

MUI Kecam Kekerasan Oknum TNI Terhadap Enam Santri di Pangandaran

Pangandaran, Jaya Pos

TNI Angkatan Darat (AD) menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di Pangandaran, Jawa Barat. Prajurit berinisial Serda HCB tersebut kini menjalani proses hukum.

Pihak TNI AD menyatakan tidak membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya. Melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, sejumlah sikap dan langkah penanganan kasus tersebut disampaikan kepada publik.

Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang melibatkan oknum prajurit dari Yonif TP 336/MS tersebut. Permintaan maaf ditujukan kepada korban, keluarga, pihak pesantren dan masyarakat Pangandaran. "Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran," kata Donny kepada para awak media, Minggu (15/11).

Donny menjelaskan satuan telah

▸▸Halaman 11

Operasi Zebra di Maros Dimulai

Pengendara di Bawah Umur hingga Balap Liar Jadi Sasaran



Apel siaga Operasi Zebra akan di mulai. (Foto/Harjan)

Maros, Jaya Pos

Polres Maros mulai menggelar Operasi Zebra Pallawa 2026 selama 14 hari, terhitung 16 hingga 29 November 2026. Operasi tersebut diawali dengan apel gelar pasukan yang dipimpin langsung Kapolres Maros, AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., Senin (16/11/2026).

Kapolres Maros, Devi Sujana, mengatakan Operasi Zebra Pallawa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban lalu lintas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Salah satu perhatian utama dalam operasi tersebut adalah penindakan terhadap aksi balap liar yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

"Jadi, operasi ini dilaksanakan selama 14 hari. Harapannya adalah selama 14 hari ini kita bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas," ujarnya.

Tahun ini, Operasi Zebra Pallawa mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan".

Devi menjelaskan, operasi tersebut merupakan langkah cipta kondisi untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan.

Menurutnya, perilaku pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

"Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi menjadi perhatian kami. Karena itu, perlu dilakukan langkah pencegahan agar risiko kecelakaan dapat ditekan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan Operasi Zebra Pallawa dilakukan melalui langkah preventif, edukatif hingga represif. Penindakan tegas akan diberikan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Maros, Iptu Suwardi, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.

Aksi balap liar menjadi salah satu pelanggaran yang mendapat perhatian khusus. Polisi memastikan pelaku akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui Operasi Zebra Pallawa 2026, Satlantas Polres Maros berharap angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. **(Hk)**

Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Kades Robbi Mochtar Prioritaskan Aspirasi dan Kebutuhan Warga Desa Timbolo

Timbolo, Jaya Pos

Pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi komitmen Kepala Desa Timbolo, Robbi Mochtar, dalam menjalankan pemerintahan desa. Sejak resmi dilantik pada 6 Oktober 2026, ia mulai memetakan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian, terutama infrastruktur jalan lingkungan serta masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial.

Dengan membawa harapan baru bagi masyarakat, Robbi Mochtar menegaskan bahwa pembangunan Desa Timbolo ke depan harus berorientasi pada kebutuhan warga, bukan sekadar mengejar pembangunan fisik. Ia ingin memastikan setiap program yang direncanakan pemerintah desa dapat memberikan manfaat nyata dan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.


Kepala Desa Timbolo, Robbi Mochtar. (Foto/Hariyanti)

Menurut Robbi, pemerataan pembangunan merupakan salah satu hal penting yang harus diwujudkan agar tidak ada wilayah desa yang tertinggal. Pembangunan harus menyentuh seluruh dusun, termasuk kawasan permukiman dan akses jalan yang selama ini masih membutuhkan pembenahan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah kondisi jalan lingkungan di Dusun I dan Dusun II. Sejumlah akses jalan masih becek ketika musim hujan, sehingga mengganggu mobilitas masyarakat, baik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengangkut hasil usaha, maupun mengakses pelayanan.

Ia menilai, keberadaan jalan yang layak merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada jalan utama, tetapi juga harus memperhatikan jalan perkampungan dan gang-gang kecil yang menjadi akses vital bagi warga.

"Pembangunan harus merata dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Jalan lingkungan, termasuk gang-gang kecil, juga harus menjadi perhatian karena di situlah masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari," ujarnya.

Robbi Mochtar menyadari bahwa tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan sekaligus. Keterbatasan anggaran dan berbagai kebutuhan desa lainnya menuntut pemerintah desa untuk menyusun perencanaan secara matang, transparan, serta berdasarkan skala prioritas.

Oleh sebab itu, ia berkomitmen mengupayakan penanganan infrastruktur secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan keuangan desa.

Selain pembangunan infrastruktur, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya warga yang belum mendapatkan bantuan, juga menjadi salah satu agenda yang ingin diperjuangkan.

Robbi berencana turun langsung ke setiap wilayah untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi dan keluhan warga. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah desa memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang secara ekonomi membutuhkan perhatian tetapi belum terdata atau belum menerima bantuan.

"Sebagai pemerintah desa, kami ingin mengetahui langsung keadaan masyarakat. Kami akan menyusuri wilayah desa untuk melihat apakah masih ada warga yang belum tersentuh bantuan. Jika memang ada, kami akan berupaya memperjuangkannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku," ungkapnya. Ia menegaskan, pendataan masyarakat yang membutuhkan perhatian harus dilakukan secara cermat agar program bantuan dapat tepat sasaran. Pemerintah desa juga diharapkan terbuka terhadap masukan masyarakat sehingga persoalan sosial yang terjadi di lingkungan warga dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Menurutnya, pemerintah desa tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Robbi Mochtar juga mengajak masyarakat Desa Timbolo untuk bersama-sama mendukung program pembangunan, menjaga persatuan, serta aktif menyampaikan aspirasi dan usulan demi kemajuan desa.

Dengan komitmen pemerataan pembangunan, pembenahan infrastruktur, peningkatan pelayanan, serta perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan, Robbi Mochtar berharap Desa Timbolo ke depan semakin berkembang.

Baginya, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata diukur dari banyaknya bangunan atau proyek yang selesai, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan perubahan, mendapatkan pelayanan yang baik, serta menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Pemerintahan desa yang responsif, terbuka, dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan Desa Timbolo yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

(Hariyanti)

DCKTR Tangsel Distribusikan Ratusan Ribu Liter Air Bersih Bagi Masyarakat Sepanjang 2026

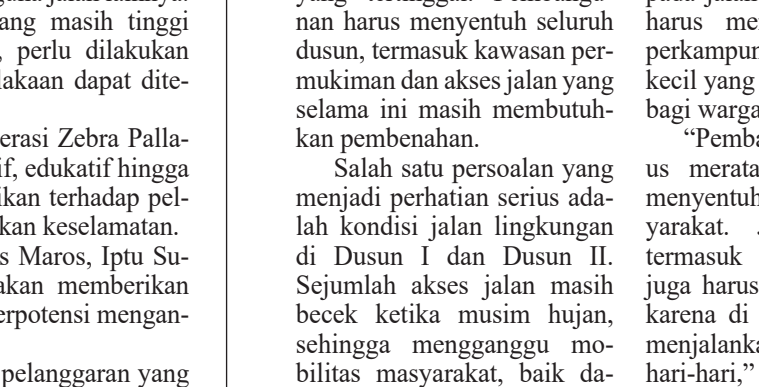
Tangerang Selatan, Jaya Pos

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten terus menggencarkan penyaluran air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Penyediaan Air Minum (PALDPAM) Sepanjang tahun 2026, tercatat sebanyak 536.000 liter air bersih telah didistribusikan ke berbagai titik di wilayah Kota Tangsel.

Kepala DCKTR Kota Tangsel, Ade Suprizal, mengungkapkan bahwa penyaluran tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dalam merespons kebutuhan mendesak warga, terutama saat menghadapi dampak kekeringan maupun kegiatan kemasyarakatan.

"Total ada 536.000 liter air bersih yang sudah kami salurkan sepanjang periode Februari hingga November 2026. Khusus pada register kegiatan periode Juli hingga November, tercatat ada 64 kali kegiatan distribusi menggunakan satu unit armada truk tangki air bersih berkapasitas besar milik UPTD PALDPAM," ujarnya dalam keterangan, dikutip Jum'at (13/11/2026).





Ade menjelaskan, fokus utama penyaluran air bersih ini menyasar wilayah permukiman warga yang mengalami krisis atau kekeringan air bersih, serta area fasilitas umum. Wilayah yang paling intensif mendapatkan suplai meliputi kawasan Kecamatan Setu dan Kecamatan Serpong.

"Untuk sebaran wilayah permukiman, armada kami secara rutin menyuplai air ke kawasan Cipeucang, Kranggan atau Keranggan, Kademangan, Setu, Babakan, Bakti Jaya, hingga Muncul di Kecamatan Setu. Selain itu, kami juga mendistribusikan air ke Kelurahan Buaran dan Serpong di Kecamatan Serpong, serta Kelurahan Pondok Benda di Kcamatan Pamulang," paparnya.

Berdasarkan data operasional DCKTR Tangsel, pada bulan Juli 2026 distribusi difokuskan sebanyak delapan kali kegiatan di wilayah Cipeucang. Memasuki Agustus hingga September, intensitas pengiriman meningkat tajam seiring adanya laporan kekeringan di wilayah Kranggan, Kademangan, dan sekitarnya, termasuk dukungan suplai air bersih ke kawasan TPA Cipeucang serta sinergi bantuan bersama BPBD.

Sementara itu, pada Oktober hingga pertengahan November 2026, distribusi terus berlanjut secara masif ke titik-titik permukiman padat, seperti Kampung Babakan, perumahan Serpong Lagoon di Kranggan, serta kawasan RT/RW di Kelurahan Buaran dan Kademangan.

Tak hanya menyasar permukiman terdampak kekeringan, Ade menambahkan bahwa pihaknya juga mendukung penuh kelancaran berbagai agenda pemerintahan dan kegiatan sosial masyarakat di Kota Tangsel.

"Selain untuk warga terdampak kekeringan, armada tangki air bersih kami juga dikerahkan untuk mendukung berbagai kegiatan publik dan seremonial daerah. Di antaranya suplai air pada acara Fun Walk di Kelurahan Parigi, upacara dan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Kodim Tangsel, Festival UMKM Kademangan, hingga peringatan Hari Pahlawan 10 November di Pahlawan Seribu," pungkasnya.**(ADV)**

Bupati Maros Launching SIPARUTUSU di RSUD La'palaloi, Pelayanan Masyarakat Kini Lebih Mudah dan Terintegrasi


Bupati Maros Chaidir Syam luncurkan Layanan SIPARUTUSU di RSUD La'palaloi. (Foto/Harjan)

Maros, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui inovasi yang mengedepankan kemudahan akses, kecepatan, efisiensi, serta koordinasi antarinstansi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran inovasi layanan SIPARUTUSU di RSUD La'palaloi, Kabupaten Maros, Rabu (18/11/2026). Inovasi ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan memangkas prosedur yang panjang dan berbelit-belit.

SIPARUTUSU merupakan akronim dari Satu Pasien, Satu Pintu, Tiga Institusi, dan Satu Solusi. Konsep tersebut dirancang untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terintegrasi melalui kolaborasi tiga institusi, sehingga masyarakat tidak perlu direpotkan dengan koordinasi maupun urusan administrasi yang berulang.

Bupati Maros, Dr. H. A. S. Chaidir Syam, mengatakan, inovasi pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah dan institusi pelayanan dituntut mampu menghadirkan proses yang sederhana, mudah dijangkau, serta memberikan kepastian pelayanan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan berkualitas tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit maupun berpindah-pindah tempat untuk mengurus berbagai kebutuhan.

"Hari ini tuntutannya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik, mendekatkan pelayanan, dan efisien. Bagaimana supaya masyarakat kita tidak berbelit-belit ataupun tidak disusahkan untuk mendapatkan pelayanan," ujar Chaidir Syam.

Ia mengapresiasi Direktur RSUD La'palaloi, dr. Syamsinar, beserta jajaran yang telah menghadirkan SIPARUTUSU sebagai bentuk terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Chaidir menilai, inovasi tersebut tidak hanya berfokus pada kemudahan akses pelayanan, tetapi juga memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi. Sebab, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat berjalan optimal apabila masing-masing institusi bekerja sendiri-sendiri.

"Alhamdulillah, hari ini melalui launching inovasi layanan yang bagus ini, Ibu dr. Syamsinar bersama teman-teman RSUD La'palaloi meluncurkan sebuah inovasi bernama SIPARUTUSU. Ini kami anggap inovasi yang luar biasa," katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Maros mendorong sistem pelayanan yang mampu memberikan solusi secara terpadu, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

"Pada akhirnya kita bukan hanya membantu mendekatkan pelayanan, tetapi juga membangun kolaborasi bersama. Ini yang utama, karena dalam sebuah sistem pelayanan, yang paling utama adalah kolaborasi," tegasnya.

Peluncuran SIPARUTUSU diharapkan menjadi langkah strategis RSUD La'palaloi dalam membangun pelayanan kesehatan yang semakin responsif, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Namun, keberhasilan inovasi ini nantinya tidak hanya diukur dari peluncuran atau konsep yang ditawarkan, melainkan juga dari implementasi di lapangan, kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Dengan hadirnya SIPARUTUSU, Pemkab Maros berharap pelayanan kesehatan semakin mudah diakses, koordinasi antarinstansi semakin kuat, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih manusiawi, transparan, serta tidak berbelit-belit.

(Hk)

Dengarkan Aspirasi Warga

Kapolres Maros Gelar Dialog Kamtibmas di Moncongloe



Kapolres Maros Kumpul bersama warga moncongloe. (Foto/Eril)

Maros, Jaya Pos

Untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Kapolres Maros AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., turun langsung menemui masyarakat guna menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan keamanan yang berkembang di tengah warga.

Kegiatan bertajuk Kumpul Bersama Masyarakat tersebut berlangsung di Warkop Sini Ngopi, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Rabu (18/11/2026), mulai pukul 09.30 Wita.

Dalam suasana santai, terbuka, dan penuh keakraban, Kapolres Maros bersama sejumlah pejabat utama Polres Maros berdialog langsung dengan masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan, masukan, maupun keluhan terkait kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Kegiatan itu turut dihadiri Kapolsek Moncongloe, para kepala desa, kepala dusun, perangkat desa se-Kecamatan Moncongloe, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kapolres Maros AKBP Devi Sujana menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata menjadi tugas kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan, kepedulian, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Kapolres juga mengingatkan para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hari. Pengawasan dan perhatian keluarga dinilai penting untuk mencegah anak terlibat dalam perilaku negatif maupun menjadi korban tindak kejahatan.

Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan media sosial dan sarana komunikasi digital. Warga juga diimbau memperhatikan keamanan rumah serta lingkungan guna mengantisipasi tindak pidana pencurian.

Polres Maros berharap dialog dan komunikasi yang terjalin dapat semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman, nyaman, dan tenteram. **(Hk)**

MTQ Desa Pondok Jaya Jadi Momentum Syiar Islam dan Penguatan Nilai Keagamaan Masyarakat



Aan Ansori ,Sip ,M.SI Dalam Rangka MTQ di Desa Pondok Jaya Kecamatan Sepatan Tangerang Banten. (Foto/Abd)

Tangerang Jaya Pos

Pemerintah Desa Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, menggelar Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat desa sebagai upaya memperkuat syiar Islam, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan MTQ tersebut menjadi momentum penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang religius, mempererat tali silaturahmi, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang Qur'ani, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman keagamaan yang kuat.

Pelaksanaan MTQ Desa Pondok Jaya turut mendapat dukungan Pemerintah Kecamatan Sepatan dan Pemerintah Desa Pondok Jaya. Kepala Desa Pondok Jaya, Deri Dermawan, menjadi bagian dari unsur pemerintah desa yang mendukung terselenggaranya kegiatan keagamaan tersebut.

MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca ayat suci Al-Qur'an, tetapi juga merupakan sarana pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, serta penguatan mental dan spiritual masyarakat. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai Al-Qur'an diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, tidak hanya sebatas dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan.

Di tengah tantangan perkembangan zaman, pembinaan keagamaan terhadap generasi muda dinilai semakin penting. Kegiatan MTQ dapat menjadi wadah positif bagi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan kemampuan membaca Al-Qur'an, mengenali nilai-nilai luhur Islam, serta membangun karakter yang berlandaskan keimanan, disiplin, dan akhlak.

Selain menjadi ajang mengasah kemampuan para qari dan qariah, MTQ tingkat desa juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Semangat kompetisi yang sehat diharapkan mampu melahirkan prestasi sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah tanpa menghilangkan nilai kebersamaan.

Pemerintah Desa Pondok Jaya diharapkan terus menjadikan kegiatan keagamaan seperti MTQ sebagai bagian dari pembinaan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah desa, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta partisipasi masyarakat, syiar Islam diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial.

Melalui penyelenggaraan MTQ ini, Desa Pondok Jaya diharapkan mampu melahirkan generasi penerus yang tidak hanya fasih membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadikan kitab suci tersebut sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, bermartabat, dan penuh toleransi.

Caption Foto: Panggung kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Desa Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, yang menjadi momentum syiar Islam dan penguatan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

(Abd)

DCKTR Tangsel Ingatkan Pemilik Gedung Penuhi Sertifikat Laik Fungsi



Tangerang Selatan, Jaya Pos

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengingatkan pemilik bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum bangunan digunakan. Kepemilikan sertifikat tersebut menjadi salah satu upaya memastikan bangunan memenuhi standar teknis dan aman bagi penghuninya.

Kepala DCKTR Kota Tangsel, Ade Suprizal, mengatakan SLF tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kelengkapan administrasi. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan layak digunakan sesuai peruntukannya.

"Memastikan bangunan memiliki kelaikan fungsi bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan setiap jiwa di dalamnya," ujarnya.

Ade menjelaskan, penilaian kelaikan fungsi bangunan mencakup sejumlah aspek teknis. Di antaranya kekuatan struktur bangunan, sistem proteksi kebakaran, instalasi listrik, sirkulasi udara, hingga ketersediaan jalur evakuasi.

Menurutnya, seluruh komponen tersebut perlu diperiksa untuk memastikan bangunan mampu memberikan perlindungan kepada penghuni dan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.

Persyaratan tersebut berlaku penting bagi berbagai jenis bangunan, mulai dari hunian, perkantoran, pusat perdagangan hingga fasilitas kegiatan usaha. Setiap bangunan harus memenuhi standar kelaikan fungsi sesuai dengan peruntukannya.

Selain berkaitan dengan keselamatan, SLF juga menjadi bagian dari kepatuhan pemilik bangunan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha tertentu, dokumen tersebut turut dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional gedung.

Ade mengingatkan pemilik bangunan agar tidak menganggap pengurusan SLF hanya sebagai tahapan administratif setelah pembangunan selesai. Pemeriksaan teknis perlu dilakukan secara cermat untuk memastikan seluruh komponen bangunan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

"Pastikan proses pengurusan dan pemeriksaan teknis bangunan ditangani oleh tim ahli yang berpengalaman agar fungsi serta legalitas gedung terjamin sepenuhnya," katanya.

Melalui pemenuhan persyaratan SLF, DCKTR Tangsel berharap kesadaran pemilik bangunan terhadap keselamatan semakin meningkat. Dengan begitu, pembangunan gedung di Tangsel dapat memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna bangunan.

(ADV)

Polres Binjai Gelar Gebyar Operasi Zebra Toba 2026, Pengendara Tertib Diberi Apresiasi dan Hadiah



Operasi Zebra Toba 2026. (Foto/Humas)

Binjai, Jaya Pos

Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat berlalu lintas, Polres Binjai menggelar Gebyar Operasi Zebra Toba 2026 dengan mengedepankan edukasi, apresiasi dan pendekatan humanis kepada pengguna jalan.

Kegiatan dilaksanakan Satlantas Polres Binjai bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Binjai, Rabu (18/11/2026), pukul 09.30 WIB, di Jalan T. Amir Hamzah dan Jalan Sutomo, Kota Binjai.

Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas Polres Binjai IPTU Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., memberikan apresiasi berupa berbagai hadiah kepada pengendara yang tertib, melengkapi surat-surat kendaraan serta mematuhi peraturan lalu lintas.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar senantiasa mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas saat berkendara.

Gebyar Operasi Zebra Toba 2026 ini merupakan upaya mengubah paradigma operasi kepolisian yang selama ini dianggap menakutkan menjadi kegiatan edukatif, humanis dan menyenangkan, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa tertib berlalu lintas merupakan kebutuhan bersama," terang Kapolres Binjai.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kesiapan Polres Binjai dalam menghadapi pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), guna mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

Polres Binjai mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama.

(Fatimah)

PENGUMUMAN

Bahwa dengan ini PT PERMATA MITRA TRANS, berkedudukan di Jakarta Timur, mengumumkan kepada pihak yang berkepentingan dan seluruh karyawan Para Pihak, bahwa PT SHIFRA ARTHANI INVESTAMA dan PT LEGALITAS GRAHA KARYA akan melakukan pengambilalihan saham atas PT PERMATA MITRA TRANS melalui pengalihan hak atas saham langsung dari para pemegang saham, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.

Pengumuman ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Para Kreditur, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau tanggapan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 19 November 2026

Direksi
PT PERMATA MITRA TRANS

PENGUMUMAN

Bahwa dengan ini PT MALUM GLOBAL INDOFARM, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, mengumumkan kepada pihak yang berkepentingan dan seluruh karyawan Para Pihak, bahwa PT MALUM GLOBAL INVESTAMA dan PT SHIFRA ARTANI INVESTAMA akan melakukan pengambilalihan saham atas PT MALUM GLOBAL INDOFARM melalui pengalihan hak atas saham langsung dari para pemegang saham, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.

Pengumuman ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Para Kreditur, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau tanggapan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 19 November 2026

Direksi
PT MALUM GLOBAL INDOFARM

Harian JAYA POS Perubahan Menuju Kemajuan
Terbit Setiap Minggu

Diterbitkan Oleh:
PT. Media Cipta Jaya Selaras
SK MENKUM & HAM RI:
Nomor: AHU-19831.40.10.2014
Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337
NPWP No: 70.947.655.0-001.000
SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271
Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220104340564

REDAKSI:
Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003
Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat
Telp: (021) 23095745
e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id
Website: www.harianjayapos.com

Pemimpin Umum:
Drs. John Hotman Malau, M.Si
Wakil Pemimpin Umum:
Leonardus Pasaribu, SH.
Badar Subur

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Toni Limbong, SH.
Pemimpin Perusahaan: Febri Oloan Seim Brando, S.Ak
Wakil Pemimpin Redaksi : Anrico Pasaribu, ST., SH.
Sekretaris Redaksi: Jaya Hasni S.
Redaktur Pelaksana: Pahotan Sinaga
Manager Pemasaran/Iklan: Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:
Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu,ST, SH
Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:
A. Ristanto , Charles Limbong
REDAKTUR:
Dede Rostini
DESAIN GRAFIS/IT:
Agus Wiro
PHOTO GRAPHER
Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Rikkot Manik
Riau: .....
Sumatera Selatan: .....
Bangka Belitung: Yustami Al
Jambi: Kusuma Inrda Wijaya
Sumatera Barat: Zakirman
Banten: Guntur Sihombing
Bengkulu:
DKI Jakarta: Jama Berutu
Lampung: Suhaili
Jawa Tengah: M. Sofi
Jawa Barat: Hendry Hutagalung
Jawa Timur: Wiro Utomo
Sulawesi Selatan: Muh. Hakim
Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi
Sulawesi Tengah Heriyanti
Kalimantan Barat : Suhardi
Kalimantan Timur .....

STAF REDAKSI:
JS. Purba | Jama Berutu | Jitro Limbong | Gurning | Jiston Sitohang | Sumihar, SH | Michael J Manurung | | Sutanto
LITBANG:
Lamser Limbong
SIRKULASI:
Nelson Hutapea
PENASEHAT HUKUM:
Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

PENASEHAT:
Tom Pasaribu, Andar Situmorang, SH.
ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.
Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

REKENING BANK:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka
Rek. No. : 1148-01-000156-30-1
a/n PT Media Cipta Jaya Selaras
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot
Rek. No. : 0379-01-002054-50-7
a/n Toni Limbong
- Bank BCA Cab. Daan Mogot
Rek. No. : 1984084008
a/n Toni Limbong

PERCETAKAN: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika
Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang
Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473
(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Polresta Banjar Tegaskan Operasi Zebra Lodaya Mengedepankan Edukasi Dan Pendekatan Humanis

Banjar, Jaya Pos

Pelanggaran lalu lintas menjadi bidikan utama Operasi Zebra Lodaya 2026 yang digelar selama 14 hari dari mulai 16 hingga 29 November 2026, Polresta Banjar mengintensifkan upaya penertiban sekaligus edukasi untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya.

Alat Keamanan Operasi yang digelar serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Barat ini bukan sekadar razia kendaraan. Mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan", pendekatan edukatif, persuasif dan humanis menjadi prioritas, tanpa mengesampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran.



Mewakili Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, Wakapolres KOMPOL Saefual Bahri memeriksa pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026 di Mako Polresta Banjar. (Foto:Mamay)

Mewakili Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, Wakapolres KOMPOL Saefual Bahri membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki saat apel pelaksanaan operasi di halaman Mako Polresta Banjar, Senin (16/11). Seluruh personel diminta menjalankan tugas profesional, menghindari sikap arogan, serta mengutamakan keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kasat Lantas Polresta Banjar, AKP Priyo Sumbodo menegaskan, Operasi Zebra Lodaya 2026 mengedepankan edukasi dan pendekatan humanis. Penindakan tetap dilakukan, tetapi harus disertai pemahaman bahwa tertib berlalu lintas merupakan kebutuhan mendasar untuk melindungi keselamatan pengguna jalan. "Kami ingin masyarakat sadar, disiplin bukan karena ada polisi, tetapi karena keselamatan adalah kebutuhan utama. Terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, kami berharap tingkat kecelakaan di Kota Banjar dapat menurun signifikan," tegasnya.

Evaluasi operasi tahun sebelumnya menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas turun 61 persen, dari 366 kejadian pada 2024 menjadi 141 kejadian pada 2025. Korban meninggal dunia turun 77 persen dan korban luka ringan berkurang 54 persen. Namun, peningkatan korban luka berat sebesar 43 persen menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan operasi tahun ini. Polda Jawa Barat mengerahkan 2.036 personel gabungan, terdiri atas 480 personel Satgas Polda dan 1.556 personel Satgas jajaran.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas juga diperketat agar operasi berjalan profesional dan tidak mencederai kepercayaan publik. Polresta Banjar mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kelengkapan berkendara. Penggunaan helm berstandar SNI, sabuk pengaman, kepemilikan SIM dan STNK, kepatuhan terhadap rambu-rambu, serta pengendalian kecepatan menjadi bagian penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman.

Alat Keamanan Operasi Zebra Lodaya 2026 diharapkan mampu mengubah perilaku pengendara, bukan hanya menekan pelanggaran selama operasi berlangsung. Sebab, keselamatan di jalan raya tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya petugas, melainkan oleh kesadaran setiap pengguna jalan untuk melindungi nyawa diri sendiri dan orang lain. **(Mamay)**

Masuk Top 30 KIJB 2026

SI KEREN EKO Ciamis Jalani Visitasi BP2D Jabar

Ciamis, Jaya Pos

Inovasi Sistem Informasi Kebijakan Perencanaan Perekonomian (SI KEREN EKO) yang dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ciamis berhasil menembus Top 30 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2026.

Capaian tersebut mengantarkan SI KEREN EKO ke tahapan visitasi dan verifikasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, Senin (16/11).

Visitasi dilaksanakan secara daring dari Aula Adipati Angganaya, Bapperida Ciamis, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Dr. H. Andang Firman Triyadi, M.T., Kepala Bapperida David Firdha, S.H., M.M., serta tim inovator SI KEREN EKO.

Masuknya SI KEREN EKO dalam 30 inovasi terbaik merupakan capaian tersendiri. Inovasi ini berhasil melewati persaingan 1.039 proposal yang masuk dalam KIJB 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 348 proposal lolos seleksi administrasi, kemudian mengerucut menjadi 60 inovasi hingga akhirnya terpilih 30 inovasi terbaik untuk mengikuti tahapan penilaian lanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Ciamis, Andang Firman Triyadi menyampaikan apresiasi kepada tim penilai BP2D Jawa Barat. Ia menilai SI KEREN EKO merupakan inovasi yang lahir dari kebutuhan nyata pemerintah daerah, terutama dalam mengatasi persoalan pengelolaan data dan informasi yang selama ini masih tersebar di berbagai sumber.

Menurutnya, dokumentasi yang belum terintegrasi serta pengetahuan yang masih bergantung pada individu pegawai dapat memengaruhi kecepatan penyediaan informasi, koordinasi, hingga kualitas pengambilan kebijakan. "Kami memandang bahwa data dan pengetahuan organisasi harus menjadi aset kelembagaan, bukan hanya tersimpan dalam individu pegawai. Oleh karena itu, SI KEREN EKO merupakan langkah positif dan relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut," ujar Andang.

Ditegaskannya, Pemerintah Kabupaten Ciamis mendukung pengembangan dan keberlanjutan inovasi tersebut. Sebab, keberhasilan inovasi bukan hanya diukur dari terciptanya aplikasi, tetapi sejauh mana sistem tersebut mampu mengubah cara kerja dan memberikan manfaat nyata.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Ciamis, David Firdha, mengungkapkan bahwa capaian Top 30 KIJB 2026 menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan.


Sekda Ciamis, Andang Firman Triyadi dan Kepala Bapperida, David Firdha, serta tim inovator SI KEREN EKO secara daring mengikuti kegiatan visitasi dan verivikasi BP2D Provinsi Jabar. (Foto:Mamay)

Menurutnya, SI KEREN EKO dirancang untuk memperkuat pengelolaan data perekonomian daerah agar lebih tertata, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.Berawal dari Persoalan Data dan Mutasi Pegawai

Di balik lahirnya SI KEREN EKO, terdapat gagasan untuk mengatasi persoalan sederhana tetapi penting dalam pekerjaan pemerintahan, yakni bagaimana menjaga data dan pengetahuan organisasi agar tidak hilang ketika terjadi pergantian pegawai.

Penggagas inovasi SI KEREN EKO, drh. Nugrahawati, MP, yang akrab disapa Retty, menjelaskan bahwa sebelum sistem tersebut dikembangkan, pencarian dan penyajian data perekonomian daerah membutuhkan waktu sekitar tiga hingga tujuh hari kerja.

Persoalan semakin terasa ketika terjadi mutasi pegawai. Dokumen dan pengetahuan yang sebelumnya dikuasai seseorang tidak selalu terdokumentasikan dengan baik sehingga pegawai baru harus kembali mempelajari berbagai informasi dari awal.

Dari pengalaman tersebut, Retty bersama tim kemudian mengembangkan sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga menjadi sarana menjaga pengetahuan organisasi agar tetap bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. "Jangan sampai ketika ada pergantian pegawai, informasi yang sudah dikumpulkan dan hasil pembahasan yang pernah dilakukan justru sulit ditemukan. Dari kebutuhan itulah SI KEREN EKO dikembangkan," jelas Retty.

Dalam pengembangannya, Retty didukung dua anggota tim inovator lainnya, yakni Irma Kusumawardani, M.E., dan Muhammad Fadhil Rahmani, S.P.W. Inovasi yang mulai dikembangkan pada 2023 dan diluncurkan pada 23 November 2023 tersebut dirancang sebagai dashboard terpadu perekonomian daerah sekaligus memori kelembagaan atau institutional memory.

Diakuinya, penerapan SI KEREN EKO membawa perubahan terhadap proses kerja di Bapperida. Jika sebelumnya pencarian dan penyajian data membutuhkan waktu tiga hingga tujuh hari, kini dapat dilakukan kurang dari satu hari kerja dengan efisiensi waktu sedikitnya 70 persen.

Dokumentasi data perekonomian juga meningkat dari kisaran 50–60 persen menjadi minimal 95 persen. Sementara data yang masih bersifat personal berhasil ditekan dari lebih 60 persen menjadi kurang dari 10 persen.

Manfaat lainnya dirasakan dalam proses adaptasi pegawai baru atau pegawai yang mengalami mutasi. Waktu yang sebelumnya membutuhkan satu hingga tiga bulan kini dapat dipersingkat menjadi satu hingga dua minggu.

(Mamay)

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga, Hunter Dominikus Samosir | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Biro Labuhanbatu/Labusel:** Gatti H Tumanggor (Kepala) **Biro Belitung/ Belitung Timur:** Yustami Al (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi :** Zakirman (Kepala), Denny Alinur || **Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Biro Pekalongan:** M Sofii (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto :** Nur As'adi (Kepala), Buaji | **Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) | **Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan: Wiro Utomo** (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Barat :** Suhardi | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala), Yuel | **Perwakilan Sulawesi Tengah :** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala)

MUI Kecam Kekerasan Oknum TNI ..... *Halaman 7*

mengambil langkah awal setelah menerima laporan terkait kejadian tersebut. Pada Kamis (12/11), Serda HCB bersama pengasuh pesantren mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan peristiwa itu.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan awal terhadap prajurit yang bersangkutan. "Pada Kamis, 12 November 2026, yang bersangkutan, Serda HCB, bersama Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan kejadian tersebut. Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh satuan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan," jelas Donny.

Pada Jumat (13/11), Serda HCB diserahkan oleh pihak Yonif TP 336/MS kepada Subdenpom III/2-4 Banjar. Penyerahan dilakukan agar yang bersangkutan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan ke Denpom Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Donny.

TNI AD juga mengungkap dugaan awal mengenai kondisi prajurit saat kejadian. Serda HCB diduga melakukan tindakan penganiayaan setelah mengonsumsi minuman keras.

Namun, Donny menegaskan informasi tersebut masih didalami oleh aparat berwenang. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan fakta dalam peristiwa tersebut. "Berdasarkan informasi awal, tindakan tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi yang bersangkutan setelah mengonsumsi minuman keras. Namun demikian, hal ini tetap menjadi bagian dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang," tegasnya.

Donny menegaskan TNI AD tidak membenarkan segala bentuk kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit. Sanksi akan diberikan sesuai ketentuan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah. "Kami menegaskan bahwa TNI AD tidak membenarkan dan tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Apabila terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tutur dia.

TNI AD meminta masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Donny memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan dan tuntas. "Kami berharap masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan dan tuntas," ujar Donny.

Selain itu, TNI AD berkomitmen meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap seluruh prajurit. Hal ini dilakukan agar setiap anggota tetap menjunjung tinggi disiplin, hukum, dan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas.

Sementara di tempat terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Pesantren, Ahmad Fahrur Rozi turut mengecam kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap enam santri Pesantren Nurul Bayan di Pangandaran. "Kami mengecam keras dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Pangandaran," katanya melalui pesan singkat, dikutip Senin (16/11).

Gus Fahrur sapaan akrabnya juga mendesak agar para pelaku diproses hukum dengan tegas, adil, serta transparan tanpa impunitas. "Kami menuntut jaminan keselamatan korban, perlindungan dari intimidasi, pendampingan hukum, serta pemulihan fisik dan psikologis," tegasnya.

Menurutnya, pesantren harus menjadi tempat yang aman untuk mendidik generasi bangsa, bukan ruang intimidasi dan kekerasan. "Saya mengapresiasi langkah cepat pimpinan TNI mengamankan terduga pelaku, " ujar Gus Fahrur.

Dirinya menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak menggeneralisasi kesalahan oknum sebagai kesalahan institusi TNI. "Kehormatan TNI terjaga dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Santri harus mendapat keadilan dan TNI harus tetap menjadi pelindung rakyat," pesannya.

(Mamay)

Pemkab Labuhanbatu Gandeng Kejari ..... *Halaman 7*

Negara (Datun) ditandatangani Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, MKM, bersama Kepala Kejari Labuhanbatu Jefri Paultje Maukar, SH, MH.

Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap hukum dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ia meminta seluruh aparatur menjalankan tugas secara profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.

"Mari kita bangun pemerintahan yang tidak hanya cepat dalam bekerja, tetapi juga benar dalam bertindak. Ingatlah bahwa jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban," tegas Bupati.

Untuk mencegah penyimpangan dan memperkuat integritas aparatur, Bupati menekankan lima hal yang harus menjadi komitmen seluruh ASN di Labuhanbatu, yakni budaya kejujuran dan disiplin, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, penguatan pengawasan internal, keteladanan pimpinan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terkait kerja sama dengan Kejari Labuhanbatu, Maya Hasmita mengapresiasi dukungan Kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Melalui peran Jaksa Pengacara Negara, Pemkab Labuhanbatu diharapkan dapat lebih cermat dan terlindungi dalam menangani persoalan hukum, terutama menyangkut pengelolaan aset daerah, kontrak kerja sama, pengadaan barang dan jasa serta keputusan administrasi pemerintahan.

Bupati juga meminta Sekretaris Daerah dan seluruh kepala perangkat daerah menindaklanjuti MoU tersebut dengan langkah nyata, bukan sekadar formalitas.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, SH, MH.

Sosialisasi mengangkat tema "Menuju Tata Kelola yang Baik dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat", sebagai upaya memperkuat pemahaman aparatur mengenai pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.**(YN)**

6.000 SPPT Masih Atas Nama Developer ..... *Halaman 7*

lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB masih tercatat atas nama pengembang atau developer, meskipun properti tersebut telah dimiliki masyarakat.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Maros dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, M. Ferdiansyah, mengungkapkan persoalan tersebut dalam evaluasi PAD yang dipimpin Wakil Bupati Maros.

Menurut Ferdiansyah, berdasarkan laporan Camat Moncongloe, petugas di lapangan menghadapi kesulitan melakukan penagihan lantaran sejumlah wajib pajak tidak ditemukan di alamat yang tercatat dalam database.

Selain itu, ribuan SPPT yang masih menggunakan identitas developer turut menjadi kendala dalam proses penagihan. Data kepemilikan yang belum diperbarui menyebabkan pemerintah kesulitan mengidentifikasi pemilik properti yang sebenarnya sekaligus memastikan kewajiban pajaknya.

"Moncongloe ini hasil rapat evaluasi PAD kemarin dengan dipimpin oleh Pak Wakil Bupati, nilai capaiannya baru 39 persen. Salah satu kendalanya karena tidak ditemukan wajib pajaknya. Kemudian ada sekitar 6.000 lembar SPPT yang belum bisa tertagih karena masih atas nama developer," ungkap Ferdiansyah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11/2026).

Menanggapi persoalan tersebut, Bapenda Maros menyiapkan langkah strategis untuk membantu pemerintah kecamatan meningkatkan efektivitas penagihan PBB. Salah satunya dengan menurunkan tim dari bidang pengelolaan dan teknologi informasi (IT) untuk melakukan pendampingan sekaligus membantu pemungutan pajak secara langsung di lapangan.

Langkah jemput bola ini dinilai penting, tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memperbaiki dan memperbarui database wajib pajak yang selama ini belum sepenuhnya akurat.

Petugas nantinya akan menyasar kawasan perumahan dan permukiman, sekaligus membantu masyarakat mengurus perubahan nama wajib pajak pada SPPT PBB dari developer kepada pemilik properti.

"Kami bersama teman-teman dari Bapenda sudah mengatur strategi bagaimana membantu pihak kecamatan melakukan penagihan. Database ada di Bapenda, sehingga teman-teman dari bidang pengelolaan dan IT akan turun ke lapangan membantu pemungutan pajak PBB," jelasnya.

Ferdiansyah mengapresiasi upaya Kecamatan Moncongloe yang selama ini terus melakukan penagihan kepada wajib pajak. Namun, ia menegaskan upaya tersebut perlu diperkuat dengan dukungan data yang akurat, koordinasi lintas sektor, serta pendekatan langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Maros berharap penerimaan PBB di Moncongloe dapat terus meningkat hingga mencapai 100 persen. Optimalisasi pajak tersebut dinilai penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Di sisi lain, Bapenda Maros mencatat realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi hingga Oktober 2026 mencapai sekitar Rp316 miliar atau 86 persen dari target.

Sementara penerimaan pajak daerah yang secara khusus dikelola Bapenda telah mencapai sekitar Rp221 miliar atau 87 persen dari target.

Dengan capaian tersebut, Ferdiansyah optimistis target penerimaan pajak daerah dapat terpenuhi hingga akhir tahun. Pihaknya terus mendorong percepatan penagihan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor.

"Kami optimistis khusus untuk pajak yang dikelola Bapenda bisa mencapai 100 persen tahun ini. Insyaallah pada Desember target tersebut bisa kita capai," ujarnya.

Terkait kendala di Moncongloe, ia menjelaskan pesatnya investasi dan pembangunan kawasan perumahan menjadi salah satu faktor yang mempersulit penagihan. Banyak pemilik properti berasal dari luar daerah dan tidak menetap di sekitar objek pajak, sehingga petugas membutuhkan waktu dan upaya lebih untuk menemukan wajib pajak.

Kondisi tersebut, menurutnya, harus diatasi melalui pemutakhiran data kepemilikan, peningkatan koordinasi dengan pengembang, serta pendataan langsung terhadap pemilik properti yang belum melakukan perubahan administrasi perpajakan.

Meski demikian, Bapenda Maros menegaskan bahwa kewajiban pembayaran PBB tetap berlaku sesuai ketentuan. Wajib pajak yang memiliki tunggakan juga dikenakan sanksi denda sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

"Karena ini PBB, pajak kena denda, jadi kita perlakukan denda," tegas Ferdiansyah.

Rendahnya realisasi PBB di Moncongloe menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, terutama di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman dan investasi. Pembenahan administrasi kepemilikan serta penguatan sistem pendataan wajib pajak menjadi pekerjaan yang harus segera dituntaskan agar potensi penerimaan daerah tidak terus tertahan.

Dengan sekitar 6.000 SPPT yang masih atas nama developer, upaya penagihan bukan sekadar persoalan mendatangi wajib pajak, melainkan juga memastikan data kepemilikan dan administrasi perpajakan berjalan seiring dengan perkembangan kawasan. **(Hk)**

BAZNAS Ciamis Raih Tujuh Kategori ..... *Halaman 7*

dan mengembangkan gerakan zakat di Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, penghargaan yang dibawa pulang dari Bandung tidak hanya menjadi pengakuan atas kinerja BAZNAS Ciamis, tetapi juga mencerminkan pentingnya sinergi antara lembaga pengelola zakat dan pemerintah daerah.

Ketua BAZNAS Kabupaten Ciamis, Drs. KH. Lili Miftah, MBA, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang kembali diraih lembaganya. Ia menegaskan, keberhasilan tersebut bukan semata-mata hasil kerja pengurus, melainkan buah dari ikhtiar bersama yang dibangun secara konsisten sejak 2021.

Lili menyampaikan apresiasi kepada pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat atas bimbingan dan pembinaan, serta kepada Bupati Ciamis atas dukungan terhadap penguatan gerakan zakat di daerah. "Alhamdulillah, ini bukan semata-mata kehebatan pengurus. Kami meyakini pencapaian ini merupakan pertolongan Allah SWT melalui ikhtiar bersama yang selama ini terus dibangun," ungkapnya.

Di balik penghargaan tersebut, ada pendekatan yang menjadi ciri pengembangan zakat di Kabupaten Ciamis, yakni membangun partisipasi masyarakat hingga tingkat desa.

Dijelaskannya, tugas amil bukan sekadar mengumpulkan dana umat, tetapi juga mengajak masyarakat menjadikan zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. "Berangkat dari spirit Surat Al-Baqarah ayat 43, kami mengambil pelajaran bahwa yang harus ditegakkan secara berjamaah bukan hanya salat, tetapi juga zakat. Posisi kami sebagai amil adalah imam dalam menegakkan rukun Islam ketiga, dengan tujuan menghadirkan ZIS sebagai bukti nyata kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Ciamis," jelas Lili.

Salah satu langkah konkretnya adalah memperkuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa sebagai ujung tombak penghimpunan dana umat. Melalui jaringan tersebut, masyarakat didorong untuk ikut berinfak tanpa harus menunggu memiliki kemampuan ekonomi besar. Bahkan, kontribusi seribu atau dua ribu rupiah tetap memiliki arti dalam membangun kekuatan sosial secara kolektif.

Lili menyebut, hampir 70 persen masyarakat muslim di Ciamis telah terlibat dalam gerakan infak atau menjadi munfik. "

Alhamdulillah, hampir 70 persen masyarakat muslim di Ciamis telah bertransformasi menjadi munfik. Meskipun dengan nominal seribu atau dua ribu rupiah, yang terpenting adalah tumbuhnya kesadaran untuk berbagi. Ekosistem itulah yang terus kami rawat," katanya.

Pendekatan ini membuat pengelolaan zakat semakin dekat dengan masyarakat. UPZ desa tidak hanya berfungsi sebagai saluran penghimpunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengenali kebutuhan warga dan persoalan sosial di lingkungannya.

Lili turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, terutama para muzakki dan munfik yang telah mempercayakan zakat, infak dan sedekahnya melalui Baznas Ciamis. "Kami yakin, dengan berpegang teguh pada syariat dan semangat menyejahterakan umat, serta didukung penuh oleh kepercayaan para munfik dan muzakki di Kabupaten Ciamis, Allah SWT akan senantiasa melimpahkan keberkahan bagi seluruh amil dan masyarakat Tatar Galuh, " pungkasnya.

(Mamay)

Imigrasi Garut Deportasi WNA Pakistan ..... *Halaman 7*

pendeportasian pada 19 hingga 23 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penanganan perkara, yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan diusulkan masuk daftar penangkalan, sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Deportasi dilaksanakan pada 23 Oktober 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan Karachi, Pakistan. Zulfikar menegaskan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut akan terus meningkatkan pengawasan keimigrasian di Kabupaten Garut dan Sumedang guna memastikan kepatuhan orang asing terhadap peraturan yang berlaku.

"Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian, menjaga kedaulatan negara, serta menerapkan prinsip selective policy, yakni hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi pembangunan dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia," tandasnya. **(Hartono)**

Bupati Simalungun Hadiri .. *Halaman 7*

mereka diharapkan bisa hidup mandiri dan memberikan kontribusi positif," tegas Anton.

Ia juga menilai sinergi pemerintah daerah dengan instansi vertikal, termasuk Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, penting untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan sumber daya manusia dan pemberdayaan warga binaan.

Bupati turut mengajak masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada mantan warga binaan yang telah berupaya memperbaiki kehidupannya. "Masa lalu bukan penghalang untuk memperbaiki diri dan meraih masa depan. Berikan mereka kesempatan untuk bangkit, mandiri, dan berkontribusi bagi kemajuan bersama," ujarnya.

Menutup sambutannya, Anton mengajak jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas, memperkuat koordinasi serta menjalankan pembinaan secara humanis dan berkelanjutan.

Peringatan Hari Bakti ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum dan pembinaan warga binaan demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik. **(Rd)**





Jubileum Emas 50 Tahun HKBP Cengkareng Dihadiri 1.500 Jemaat

Ephorus Ajak Umat Mengelola Berkat Tuhan dengan Bijaksana



Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST melepas merpati.



Prosesi ibadah menuju Gereja

Jakarta, Jaya Pos

Pesta Jubileum Emas atau perayaan 50 tahun HKBP Cengkareng di Jakarta Barat berlangsung dengan penuh sukacita, khidmat, dan semarak pada Minggu (15/11/2026). Perayaan bersejarah yang digelar di Gereja HKBP Cengkareng ini dihadiri sekitar 1.500 jemaat, tokoh gereja, pejabat, dan tokoh nasional.

Perayaan ini menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama setengah abad serta refleksi perjalanan iman dan pelayanan seluruh jemaat sejak berdirinya gereja. Rangkaian acara diawali dengan pelepasan lima pasang burung merpati yang melambangkan perdamaian, kasih, persatuan, dan pengharapan.

Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST, bersama sejumlah tokoh gereja ikut melepas burung merpati. Setelah itu, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Jubileum Emas sebagai tanda kenangan perjalanan pelayanan selama lima dekade.

Dalam ibadah syukur, Ephorus HKBP menyampaikan khotbah berdasarkan Injil Lukas 19:11-27, mengajak jemaat memahami bahwa berkat, talenta, dan kesempatan yang dimiliki adalah anugerah Tuhan yang harus dikelola dengan bijaksana demi kebaikan bersama. Ia mengingatkan bahwa Tuhan mengenal dan mengasihi umat-Nya lebih dari diri mereka sendiri.

Perayaan juga dimeriahkan dengan pemotongan kue ulang tahun yang dihadirkan di depan altar gereja dan pemberian ulos kepada tamu kehormatan, para pendiri gereja, serta jemaat dari berbagai rayon sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan dalam tradisi Batak.



Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST menandatangani prasasti 50 tahun HKBP Cengkareng

Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Ali Murthadho, mewakili Gubernur DKI Jakarta yang berhalangan hadir, hadir dalam acara tersebut. Tokoh nasional lain seperti Mayjen TNI (Purn.) Saurif Kadi dan dr. Agung Laksono juga turut hadir.

Ketua Panitia Jubileum Emas, Drs. Parsaoran Marbun, mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan jemaat atas kerja sama dan dukungannya, yang memungkinkan acara berlangsung sukses dari pagi hingga sore hari.

Semarak acara semakin terasa dengan penampilan tortor dari naposo HKBP Cengkareng dan hiburan grup musik Amigos, menunjukkan semangat generasi muda dalam melestarikan budaya dan keberlanjutan pelayanan gereja.

Acara ditutup dengan doa bersama dan lagu "O Tano Batak," menambah suasana haru sekaligus kebanggaan terhadap budaya dan tanah leluhur.



Pemimpin Redaksi Harian Jaya Pos Toni Limbong, SH dan istri di ulosin oleh Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST

Jubileum Emas ini bukan sekadar peringatan usia gereja, tetapi juga momentum memperkuat iman, persaudaraan, dan pelayanan sekaligus mempersiapkan generasi penerus sebagai pelanjut karya pelayanan gereja di masa depan. Diharapkan, HKBP Cengkareng terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat luas.

(Red)



Tiga undangan khusus mendapat ulos dari Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST.



Pdt yang pernah melayani di Gereja HKBP Cengkareng..



Undangan Khusus poto bersama dengan jemaat HKBP Cengkareng.